

Politik Kontemporer Timur Tengah

Diktat



Drs. Sri Yunanto, M.Si, Ph.D

PASCA SARJANA TIMUR TENGAH DAN ISLAM

Sekolah Kajian Global dan Stratejik

Universitas Indonesia

Kata Pengantar

Kawasan Timur Tengah bisa dikatakan merupakan kawasan paling dinamis di dunia sejak umat manusia membangun peradaban hingga saat ini. Pada zaman dahulu Timur Tengah merupakan Kawasan peradaban besar seperti Mesopotamia, Assyria, Persia, Mesir dan Arab. Di Kawasan ini juga para nabi dan rasul diturunkan. Agama-agama besar juga dilahirkan dan berkembang di Kawasan ini. Belum lagi kekayaan alam yang melimpah di Kawasan ini.

Pada masa kontemporer kawasan Timur Tengah tidak pernah lepas dari ketegangan atau konflik baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kawasan Timur Tengah juga tidak pernah lepas dari perebutan pengaruh dari negara-negara adidaya; Amerika, Uni Soviet, Negara-negara Eropa dan Cina. Konflik dan ketegangan juga sangat dinamis. Selain itu beberapa tahun terakhir Timur Tengah juga diwarnai dengan maraknya fundamentalisme dan terorisme seperti yang dilakukan oleh Al Qaeda dan ISIS. Agenda kedepan masyarakat internasional harus menghadapi ketegangan di Timur Tengah yang dimotori oleh Saudi Arabia dan Iran. Ketegangan di Kawasan ini mempengaruhi dinamika politik internal, hubungan bilateral dan juga multilateral diantara negara-negara di Kawasan ini

Modul ini membahas sebagian dinamika politik kontemporer Timur Tengah, khususnya dinamika politik yang hampir seluruhnya di warnai konflik dan ketegangan seperti konflik di Yaman, Konflik yang melibatkan suku Kurdi di berbagai negara dan ketegangan internal di Bahrain dan ketegangan antara Qatar dengan negara-negara Teluk yang dimotori oleh Saudi Arabia. Diktat ini juga sedikit membahas munculnya Gerakan fundamentalis dan terorisme seperti awalnya dimotori oleh Al Qaeda dan kemudian Islamic State Of Irak and Syam (ISIS)

Diktat ini merupakan kelengkapan kegiatan belajar mengajar pada Program Pascasarjana Timur Tengah dan Islam (PSTTI) Sekolah Kajian Global dan Strategik Universitas Indonesia. Mata Kuliah Isu Kontemporer merupakan Mata Kuliah yang sayaampu sejak beberapa tahun belakangan. Diktat ini diharapkan memberikan materi yang singkat sesuai dengan jumlah jam pengajaran. Sebagai Mahasiswa Pascasarjana seharusnya tidak hanya berpuas diri dengan hanya membaca diktat ini. Mahasiswa yang berminat untuk mendalami isu-isu politik Timur Tengah diharapkan dapat mendalami isu Timur Tengah dengan menggunakan referensi yang lebih luas dari diktat ini. Dengan kata lain, mahasiswa seharusnya menggunakan diktat ini sebagai jendela untuk masuk ke referensi-referensi yang lebih luas. Sebagiannya dicantumkan dalam daftar pustaka ini.

Sebagai sebuah diktat, karya ini saya yakin masih jauh dari memuaskan dan kesempurnaan. Untuk itu kami sangat terbuka dengan masukan, kritik komentar agar diktat ini bisa ditingkatkan atau disempurnakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih .

Bekasi, 20 Juli 2018

Drs. Sri Yunanto. M.Si, Ph.D

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I : POLITIK KONTEMPORER YAMAN

I.1 Sejarah Yaman	1
I.2 Yaman Utara dan Selatan	2
I.3 Politik Kontemporer Yaman: Konflik Politik di Yaman	10
I.4 Situasi Konflik Saat Ini	14

BAB II: POLITIK KONTEMPORER SUKU KURDI

II.1 Sejarah Suku Kurdi	18
II.2 Pemberontakan Suku Kurdi di Timur Tengah	20
II.2.1 Suku Kurdi di Iran	21
II.2.2 Suku Kurdi di Irak	22
II.2.3 Suku Kurdi di Turki	25
II.2.4 Suku Kurdi di Negara Lainnya	28
II.3 Politik Kontemporer Suku Kurdi di Irak dan Revolusi Suriah	30

BAB III : POLITIK KONTEMPORER BAHRAIN

III.1 Sejarah Bahrain	34
III.2 Konflik di Bahrain	37
III.3 Peran Kuwait Sebagai Mediator	43
III.4 Politik Kontemporer Bahrain	48

BAB IV : POLITIK KONTEMPORER QATAR

IV.1 Sejarah Qatar	52
IV.2 Politik Kontemporer Qatar : Embargo Terhadap Qatar	53
IV.3 Qatar dan OPEC	59

BAB V: FUNDAMENTALISME DAN TERORISME DI TIMUR TENGAH

V.1 Fundamentalisme	63
V.2 Fundamentalisme dan Terorisme Kontemporer Di Timur Tengah	65
V.3 Terorisme Al Qaeda	71

V.4 ISIS	75
V.5 Misi, Gerakan dan Metode Perekrutan	77
V.6 Perkembangan Terkini	80
Daftar Pustaka	86

BAB I

POLITIK KONTEMPORER YAMAN

I.1 Sejarah Yaman

Yaman adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya atau yang lebih tepat berada di sebelah selatan semenanjung Arab juga termasuk bagian wilayah Timur Tengah. Berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi di sebelah utara, negara Oman di sebelah timur, laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut merah di sebelah barat. Dari segi lingkungan alam negara ini mempunyai keuntungan karena memiliki curah hujan yang lebih tinggi dan tanah yang lebih subur daripada daerah Arabia lainnya (Lenczowski, 1992. 370). Yaman merupakan salah satu negara di Jazirah Arab dengan peradaban tertua di dunia. Pada Zaman dahulu Yaman merupakan wilayah kerajaan Saba' yang sangat tersohor dengan kekayaan alamnya. Namun, karena penguasaan dan eksplorasi bangsa lain yang melampaui batas, kini Yaman menjadi negara termiskin dengan rata-rata perkapita pertahun sebesar 800 dollar AS (Phillip, 2008.39) Islam masuk ke Yaman pada tahun 630 ketika Nabi Muhammad Saw mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ajaran Islam di Sana'a (Menelusuri Sejarah Islam di Yaman," <http://www.republika.co.id>). Pada saat itu, Yaman merupakan wilayah yang paling maju di Jazirah Arab. Pada abad ke-16, Yaman dikuasai oleh Dinasti Usmaniyyah yang kemudian ditaklukkan oleh kelompok Syi'ah

Zaidiyyah dibawah pimpinan Yahya Muhammad Hamiduddin. Sejak saat itu, kelompok Syi'ah Zaidiyyah menjadikan Yaman Utara sebagai pusat pemerintahannya (Ghafur, 2015.121).

I.2 Yaman Utara dan Selatan

Yaman Utara adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Turki Ottoman pada tahun 1918. Yaman Utara merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang Imam. Sedangkan Yaman Selatan setelah melepaskan diri dari cengkraman Imperialisme Inggris negara itu dengan cepat mendeklarasikan terbentuknya Republik Demokratik Rakyat Yaman dengan sistem pemerintahan meniru Uni Soviet (Mulyastanto.UPI Repository.4)

Republik Arab Yaman (Yaman Utara) sebenarnya merupakan daerah bagian dari Kesultanan Turki Ottoman. Penguasaan Turki terhadap daerah Yaman bagian utara sudah berlangsung selama berabad-abad. Namun dengan kekalahan Turki pada saat Perang Dunia I, Yaman bagian utara akhirnya merdeka sepenuhnya dari penjajah pada tahun 1918. Saat awal kemerdekaannya dari Turki, penguasa tunggal Yaman Utara yaitu Imam Yehya menginginkan bersatunya Yaman dibawah kepemimpinannya. Imam Yehya menginginkan Yaman Selatan yang pada waktu itu dikuasai oleh Inggris masuk ke daerah kekuasaannya. Berkali-kali Imam Yaman itu selalu berusaha ingin mendapatkan kekuasaan atas daerah Yaman Selatan yang pada waktu itu beribu kota di Aden, baik melakukan penyerangan secara militer

hingga melakukan diplomasi dengan Inggris. Namun seluruh usaha Sang Imam selalu gagal. Usaha Imam Yehya akhirnya terhenti akibat kudeta yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah mantan Gubernur wilayah Hodeida dan menteri negara. Kudeta ini merenggut nyawa Imam Yehya sang Imam Yaman. Kematian Imam pada 17 Februari 1948 merupakan konflik internal yang pertama terjadi di wilayah ini. Peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah membawa ketidakstabilan politik di wilayah Yaman Utara, banyak kelompok yang menolak pemimpin baru Yaman tersebut, tak berselang lama peristiwa kudeta kembali terjadi dilakukan oleh Emir Sheif al-Islam Ahmed yang kemudian menjadikan Emir tersebut menjadi Imam di Yaman Utara. Peristiwa kudeta ini juga membawa Yaman kembali ke sistem kerajaan/imamah (Lenczowski, 1992.370-375). Peristiwa kudeta tersebut berdampak pula bagi masuknya pengaruh negara-negara Arab lainnya. (Gerges FA. 1995.2) Pengaruh negara-negara yang paling kuat di Yaman Utara adalah negara Mesir dengan Pan-Arabisme dan negara Arab Saudi dengan sistem kerajaannya. Mesir mengirimkan senjata dan pasukannya untuk membantu kelompok anti-Imamah sedangkan Arab Saudi memberikan dana finansial kepada pemerintah Imam. (Mulyastanto . UPI , Repository . 5)

September tahun 1962, kembali terjadi peristiwa kudeta yang dilakukan oleh kepala penjaga kerajaan, Abdallah al-Sallal terhadap Mohammed al-Badr yang merupakan anak serta penerus dari Imam Ahmed. Dalam kudeta tersebut terbentuk Dewan Komando Revolusioner, yang dipimpin oleh al-Sallal sendiri. Dia kemudian mengumumkan penghapusan sistem Imamah yang

sangat kuno, serta penghapusan dinasti dari keluarga Hamid al-Din dan membentuk Republik Arab Yaman (Gerges FA. 1995.6).

Imam yang di bantu oleh Arab Saudi akhirnya kalah, namun peristiwa kudeta tersebut menjadikan konflik berkepanjangan serta perang saudara di Yaman Utara. Yaman Utara menjadi korban dari perang kepentingan antara Mesir dan Arab Saudi yang dimana kedua negara besar tersebut memberikan bantuannya, baik dari kebutuhan militer sampai perekonomiannya. (Ferris, J. 2008. 2)

Gagalnya Pan-Arabisme yang dipimpin oleh Mesir serta pengaruh dari kekalahan perang enam hari dengan Israel merupakan hal yang sangat mempengaruhi perang saudara di negara Yaman Utara. Pasukan anti-imamah atau republik yaitu pasukan yang sangat tidak setuju dengan sistem pemerintahan kerajaan menjadi tidak mempunyai dukungan lagi, namun dapat berhasil mempertahankan sistem Republik di Yaman Utara. Dengan peristiwa tersebut pula akhirnya negara Arab Saudi pun dengan terpaksa mendukung pemerintahan Republik Arab Yaman (Yaman Utara) dan mengakui kemerdekaan Republik Arab Yaman pada tahun 1970, hingga negara ini ber-unifikasi dengan saudara selatannya yaitu Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan) pada tahun 1990 Setelah Yaman Utara berhasil mendirikan sebuah negara Republik, Yaman bagian selatan masih tetap dikuasai Inggris dari tahun 1839 hingga keluarnya Inggris pada tahun 1967. Pada saat Inggris masih berkuasa atas daerah itu Yaman Selatan

bernama Protektorat Aden dan kemudian kekosongan kekuasaan yang berada disana diambil alih kaum Marxisme (Pelletiere, S.C. 1996.16-17)

Berdirinya negara Yaman Selatan adalah dampak dari terjadinya perang dingin antara dua kekuatan *superpower* Amerika Serikat dan Uni Soviet serta berkembangnya pengaruh Pan- Arabisme yang disuarakan oleh Gamal Abdul Nasser pemimpin Mesir. Kedua negara adidaya itu saling memperebutkan hegemoninya di seluruh dunia. Pan- Arabisme juga mulai banyak diadopsi oleh para pemimpin-pemimpin negara Arab lainnya. Tanpa terkecuali di Yaman bagian selatan. Berdirinya Republik Arab Yaman (Yaman Utara) disusul oleh hengkangnya Inggris dari wilayah Yaman Selatan pada tahun 1967. Inggris terpaksa meninggalkan Yaman Selatan khususnya di wilayah Aden karena mulai adanya kesadaran politik serta masuknya pengaruh Naserisme. Di Aden sendiri sebenarnya sejak Oktober 1961 sudah ada kelompok Marxisme yang menamakan dirinya *People's Democratic Union* (PDU) yang dipimpin oleh Abdallah bin Abd al-Razzaq Ba Dhib. Selain itu terdapat pula kelompok *Front for the Liberation of Occupied South Yemen* (FLOSY) atau Front Pembebasan Pendudukan Yaman Selatan (Halliday, 1990, hlm. 8). Namun yang berhasil mengambil kesempatan ini adalah kelompok *National Liberation Front* (NLF) atau Front Pembebasan Nasional yang dipimpin oleh Qahtan al-Sha'abi. Karena pada tahun yang sama dengan perginya Inggris dari Yaman Selatan, yaitu pada tahun 1967 kaum marxisme pimpinan Qahtan al- Sha'abi ini dengan cepat mendeklarasikan berdirinya negara *People's Republic of South Yemen* atau

Republik Rakyat Yaman Selatan (Yaman Selatan). Golongan NLF menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat negara sendiri yang berpaham politik Sosialis (Mulyastanto. 5)

Setelah berdirinya negara Yaman Selatan, konflik internal mulai menggeroti pemerintahan. Kelompok Front Pembebasan Pendudukan Yaman Selatan (FLOSY) yang berhaluan politik Nasionalis dan juga merupakan rival dari kelompok Front Pembebasan Nasional (NLF) sejak negara ini belum berdiri melakukan *coup* terhadap pemerintahan resmi yang baru berdiri tersebut. Namun peristiwa kudeta tersebut mengalami kegagalan yang berdampak bubarnya kelompok FLOSY pada tahun 1967. Setelah berdirinya negara baru tersebut, pengaruh perang dingin khususnya pengaruh Uni Soviet dan Blok Timur kini mulai menancap di negeri Yaman, kejadian itu juga mengakibatkan runtuhnya rejim-rejim kolot para sultan lokal di negeri Yaman. Namun keberhasilan Qahtan al- Shaabi mendirikan negara baru ini bertahan hingga pertengahan tahun 1969, karena pada tanggal 22 Juni pada tahun yang sama *clash* kembali terjadi, kali ini antara Qahtan al-Shaabi dengan Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Ali Haytam yang termasuk kedalam anggota kelompok NLF serta para petinggi pemerintahan lainnya. Penyebab *clash* tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai sistem pemerintahan di negara Republik Rakyat Yaman Selatan. Muhammad Ali Haytam yang bekerjasama dengan Menteri Pertahanan Muhammad Shalih ‘Awlaki melakukan *coup* kepada Qahtan al-Shaabi yang mengakibatkan runtuhnya rezim Qahtan al-Shaabi yang lebih moderat tersebut

Peristiwa kudeta yang terjadi pada negara Republik Rakyat Yaman Selatan kini membawa banyak perubahan di negara Yaman Selatan. Sebenarnya selain perbedaan dalam sistem pemerintahan di Yaman, kudeta yang dilakukan oleh Muhammad Ali Haytam juga merupakan perbedaan dalam konsep kepartaian dan politik luar negeri Yaman(Mulyastanto.8). Ali Haytam sendiri merupakan anggota yang termasuk dalam golongan Marxisme radikal di dalam organisasi NLF. Berbeda dengan al-Shaabi yang merupakan Marxisme yang lebih moderat. Perubahan sistem pemerintahan yang dilakukan pemimpin baru Yaman Selatan pada tahun 1970 dari sistem yang awalnya tidak menerapkan konstitusional menjadi sistem konstitusional membawa pengaruh juga terhadap perubahan nama negara, yang awalnya *People's Republic of South Yemen* atau Republik Rakyat Yaman Selatan menjadi *People's Republic Democratic of Yemen* atau Republik Demokratik Rakyat Yaman Presiden baru Yaman Selatan digantikan oleh Salim Rubai Ali dengan Muhammad Ali Haytam sebagai Perdana Menteri. (Milroie, L. 1983.16)

Terbentuknya dua negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses unifikasi atau penyatuan kembali negara Yaman yang sebenarnya sudah direncanakan oleh penguasa Yaman Utara pada saat itu. Ditambah banyaknya konflik dan kudeta yang melanda pada masing kedua negara tersebut juga menjadikan Yaman semakin jauh dari proses unifikasi. Baru pada tahun 1972 kedua negara ini dengan masing-masing pemimpinnya yaitu presiden Yaman utara Al-Hamdi dan pemimpin

Yaman selatan Rubay'a Ali mengadakan pertemuan untuk membahas proses penyatuan kembali negara Yaman. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang sangat berpengaruh, karena setelah pertemuan tersebut, kedua negara ini kembali terlibat konflik baik internal dan eksternal. Konflik eksternal yang dimaksud adalah konflik dengan saudaranya utaranya, yaitu Yaman Utara. Namun konflik tersebut tidak menyebabkan terjadi perang, hanya menimbulkan ketegangan di daerah perbatasan. Peristiwa kudeta terjadi di Yaman utara pada tahun 1978, terbunuhnya presiden Al-Hamdi oleh para pemberontak yang kurang puas terhadap kepemimpinannya. Peristiwa kudeta tersebut membawa Ali Abdullah Shalleh menjadi pemimpin di wilayah Yaman utara. Pergantian pemimpin yang terjadi di Yaman utara membawa negara Yaman utara semakin dekat hubungannya dengan Arab Saudi. Selain membawa hubungannya semakin baik dengan Arab Saudi, peristiwa tersebut juga membawa arah penyatuan kembali dengan Yaman selatan semakin dekat. (Mulyastanto.9).

Selain Yaman utara yang juga melakukan hubungan baik dengan Arab Saudi, Yaman selatan pun melakukan hal serupa. Negara Yaman selatan melakukan hubungan kerjasama dengan negara Arab Saudi dalam hubungan politik dan ekonomi. Tujuan Arab Saudi melakukan hubungan kerjasama dengan kedua negara Yaman ini agar kedua negara Yaman ini dapat segera melakukan *integration unification* (Lu , X 2010.112). Setelah ketegangan - ketegangan yang dialami dua negara Yaman tersebut, akhirnya pada penghujung tahun 1980 presiden Yaman Utara Ali Abdullah Shaleh bertemu

dengan Presiden Yaman Selatan Ali Nassir Muhammad untuk membahas kembali mengenai proses penyatuan antara dua negara Yaman tersebut. Hasil dari pertemuan antara kedua pemimpin Yaman tersebut berdampak pada perjanjian – perjanjian yang lebih mengarahkan kepada proses penyatuan antara kedua negara (Mulyastanto.10).

Hasil dari perjanjian yang terlaksana pada tahun 1980 tersebut menghasilkan empat fase yang dimana fase - fase tersebut berupa pertemuan yang membicarakan mengenai perjanjian-perjanjian lainnya untuk memuluskan jalan menuju proses penyatuan. Fase pertama adalah terlaksananya pertemuan di Taizz pada tanggal 16-18 April 1988 antara presiden Yaman utara Ali Abdullah Shaleh dengan perdana menteri Yaman Selatan, Salim al-Beidh yang meneruskan pembahasan mengenai unifikasi yang sebelumnya sudah terlaksana. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1988 di ibukota Yaman utara yaitu Sana'a yang juga membicarakan mengenai kelanjutan dari rencana proses penyatuan kembali negara Yaman, dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1988 dan kemudian fase yang terakhir adalah pada tanggal 19 November 1988, fase ini merupakan pembicaraan dan pertemuan terakhir sebelum proses unifikasi dilakukan. (Dunbar, C. 1992. 459) Setelah fase tersebut terlaksana akhirnya pada tahun 1989 kedua negara ini mulai mempersiapkan lebih serius untuk proses unifikasi yang dimana proses penyatuan kedua negara Yaman ini sudah di cita-citakan oleh penguasa Yaman utara yaitu Imam Yehya juga oleh para penduduk Yaman bagian utara dan Yaman bagian Yaman selatan.(Mulyastanto.11).

Yaman Utara dan Selatan bersatu menjadi satu negara pada tahun 1990, tetapi separatis di selatan mencoba untuk melepaskan diri dari utara pro-serikat pada tahun 1994. Pasukan mereka dengan cepat dipukul mundur, dan lebih banyak kekuatan dan sumber daya mengalir ke ibu kota utara Sanaa, membuat marah banyak orang selatan. Mantan Presiden Ali Abdullah Saleh telah memerintah Yaman utara sejak tahun 1978 dan negara tersebut yang bersatu setelah tahun 1990 mengasingkan banyak orang Yaman. Kerabatnya mengendalikan bagian inti dari tentara dan ekonomi, dan kritikus mengatakan korupsi merajalela . Di ujung utara, beberapa sekte Zaydi dari Islam Syiah juga bermasalah. Zaydi telah memerintah Yaman utara hingga revolusi tahun 1962, tetapi pusat pemerintahan mereka sekarang miskin. Pada akhir tahun 1990-an, beberapa orang Zaydi membentuk kelompok Houthi, yang memerangi tentara Yaman dan bersahabat dengan Iran. Meskipun bersekutu dengan Saleh, namun Ikhwanul Muslimin dan Islam Sunni lainnya juga memperoleh kekuatan, terutama di bawah Jenderal Ali Mohsen al-Ahmar, yang membangun basis kekuatan di tentara. Mengambil keuntungan dari persaingan faksi, buronan militan membentuk Al-Qaeda di Jazirah Arab (AQAP) salah satu kelompok sayap paling kuat dan mulai melakukan serangan (<https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/>)

I.3 Politik Kontemporer Yaman: Konflik Politik di Yaman

Kelompok Ansar Allah (kadang-kadang disebut Ansarullah), yang dikenal sebagai Houthi, adalah kelompok Zaidi dengan asal-usulnya di

Kegubernuran Sa'dah pegunungan di perbatasan utara Yaman dengan Arab Saudi. Mereka memimpin pemberontakan tingkat rendah terhadap pemerintah Yaman pada tahun 2004, setelah pemimpin mereka, Hussein Badreddin al-Houthi, terbunuh dalam apa yang dilaporkan sebagai tindakan keras militer pemerintah setelah memprotes kebijakan pemerintah. Intensitas konflik meningkat dan menyusut selama tahun 2000-an, dengan beberapa perjanjian damai dinegosiasikan dan kemudian diabaikan. Pemberontakan Houthi memanas pada 2009, membuat negara tetangga Arab Saudi memihak dan membantu pemerintah Yaman. Namun konflik Yaman tahun berikutnya setelah gencatan senjata ditandatangani. Kemudian selama tahap awal Revolusi Yaman pada tahun 2011, pemimpin Houthi Abdul-Malik al-Houthi menyatakan dukungan kelompok untuk demonstrasi yang menyerukan pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh.

Belakangan di tahun itu, ketika Saleh bersiap untuk meletakkan jabatan, Houthi mengepung desa Dammaj yang dihuni mayoritas salafi di Yaman utara, langkah menuju otonomi virtual untuk Sa'dah. Houthi memboikot pemilihan satu calon pada awal 2012 yang dimaksudkan untuk memberi Abdrabbuh Mansur Hadi masa jabatan dua tahun. Mereka berpartisipasi dalam *National Dialogue Conference*, tetapi menahan dukungan dari kesepakatan akhir pada awal 2014 yang memperpanjang mandat Hadi di kantor selama satu tahun lagi (<https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/>).

Houthi dan pemerintah Yaman telah terlibat bentrokan sejak 2004, dengan disela gencatan senjata beberapa kali. Namun pertempuran ketika itu hanya terjadi di utara Yaman, di provinsi miskin, Saada. Pada September 2014, pemberontak Houthi mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, hingga terus ke wilayah selatan ke kota terbesar kedua Yaman, Aden. Negara-negara Arab kemudian melancarkan kampanye militer pada 2015 untuk mengalahkan Houthi dan memulihkan pemerintahan Yaman.

Jejak pertempuran skala besar dimulai ketika peralihan kekuasaan dari penguasa otokratis, Presiden Ali Abdullah Saleh, kepada wakilnya yang menjadi presiden saat ini, Abd Rabbu Mansour Hadi pada November 2011. Ketika itu Hadi berupaya menuntaskan masalah Yaman di antaranya serangan Al Qaeda, gerakan separatis yang muncul di selatan, perpecahan di kubu militer, korupsi, kekurangan pangan dan pengangguran. Kemudian gerakan Houthi muncul di tengah masalah negeri. Houthi, gerakan dari wilayah pegunungan di utara Yaman pada 2004, yang merupakan gerakan Syiah Zaidi, semakin berkembang di tengah ketakutan masyarakat dari dominasi Sunni.

Pertempuran kecil awalnya hanya terbatas pada kawasan pegunungan di Saada. Kemudian meluas ke wilayah utara lain seperti Amran dan wilayah barat, Al Jawf. Houthi mendapat momentum pada 2011 dan menguasai seluruh Provinsi Saada. Perang sipil Yaman dimulai pada 2014 ketika pemberontak Houthi, gerakan Syiah yang memiliki hubungan dengan Iran

dan berposisi dengan Sunni, mengambil alih ibu kota Yaman dan kota besar lain, menuntut harga barang pokok turun dan pemerintahan baru. Setelah negosiasi gagal, para pemberontak merebut istana presiden pada Januari 2015, yang membuat Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi dan pemerintahannya terpaksa mengundurkan diri.

<https://dunia.tempo.co/read/1142124/kenapa-yaman-dilanda-perang>).

Desakan agar Presiden Hadi mundur pada Januari 2015 akibat efek domino dari Arab Spring, membuat Houthi terus menuju ke Yaman selatan dan mengambil alih Abyan, Aden dan Lahj, dikutip dari *European Council on Foreign Relation*. Pada Juli dan Agustus 2015, Houthi ditahan oleh pejuang milisi dukungan koalisi Arab. Awal Maret 2015, koalisi negara-negara Teluk Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi meluncurkan kampanye isolasi ekonomi dan serangan udara terhadap gerilyawan Houthi, dengan dukungan logistik dan intelijen AS, dilansir dari *Council on Foreign Relations*. Setelah kampanye militer Koalisi Arab, Hadi membatalkan pengunduran dirinya dan kembali ke Aden pada September 2015, dan pertempuran berlanjut sejak itu.

Intervensi kekuatan regional dalam konflik Yaman, termasuk Iran dan negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi, membuat Yaman semakin terjerumus dalam perpecahan Sunni-Syiah. Arab Saudi membentuk koalisi negara-negara Arab untuk mengalahkan Houthis di Yaman pada 2015. Koalisi Arab terdiri dari Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan dan Senegal. Beberapa dari negara-negara ini

telah mengirim pasukan untuk bertempur di tanah Yaman, sementara yang lain hanya melakukan serangan udara. Pemerintah AS secara teratur meluncurkan serangan udara pada al Qaeda dan ISIS di Yaman, dan baru-baru ini mengakui telah mengerahkan sejumlah kecil pasukan di lapangan, dilaporkan Aljazeera. AS bersama dengan kekuatan Barat lainnya seperti Inggris dan Prancis, juga memasok Koalisi Arab dengan senjata dan intelijen. Iran membantah telah mempersenjatai pemberontak Houthi, tetapi militer AS mengatakan telah mencegah pengiriman senjata dari Iran ke Yaman. Para pejabat Iran juga menyarankan agar mereka mengirim penasihat militer untuk mendukung Houthi

Juli 2016, dua kelompok yang bersekutu, yakni gerakan Houthi dan pemerintah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang digulingkan pada 2011 setelah hampir tiga puluh tahun berkuasa, mengumumkan pembentukan dewan politik untuk memerintah Sana'a dan sebagian besar Yaman utara. Desember 2017, Saleh memutuskan hubungan dengan Houthi dan meminta para pengikutnya untuk mengangkat senjata berbalik melawan Houthi. Saleh terbunuh dan pasukannya kalah dalam dua hari, namun konflik internal masih dilanjutkan oleh pengikutnya hingga hari ini (<https://dunia.tempo.co/read/1142124/kenapa-yaman-dilanda-perang>)

I.4 Situasi Konflik Saat Ini

Aljazeera melaporkan pada 26 Maret 2018, setidaknya 10.000 warga Yaman tewas akibat perang, dengan lebih dari 40.000 korban jiwa secara

keseluruhan. *Save The Children* memperkirakan setidaknya 50.000 anak-anak meninggal pada 2017, dengan rata-rata 130 anak-anak meninggal setiap harinya. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, telah memperkirakan bahwa serangan udara Koalisi Arab Saudi menyebabkan hampir dua pertiga dari kematian warga sipil yang dilaporkan, sementara Houthi dituduh menyebabkan korban sipil massal karena pengepungan mereka terhadap Taiz, kota terbesar ketiga Yaman.

International Rescue Committee (IRC) menyebut Yaman dilanda krisis kemanusiaan terparah di dunia. 22 juta lebih warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat kelaparan bersama dengan wabah kolera yang terburuk dalam sejarah dunia moderen. Sekitar 8 juta lebih warga Yaman kelaparan dan 16 juta orang kehilangan akses kesehatan. Serangan udara terjadi rata-rata satu kali setiap 99 menit selama tiga tahun terakhir, ketika warga sipil Yaman tidak bisa mendapat makan dan perawatan kesehatan, menurut IRC. UNICEF melaporkan 11 juta lebih anak-anak Yaman membutuhkan bantuan. Anak-anak [Yaman](#) dilaporkan tewas setiap 10 menit akibat perang. (<https://dunia.tempo.co/read/1142124/kenapa-yaman-dilanda-perang>).

Yaman telah menjadi lokasi perang antara koalisi pimpinan Saudi dan pemberontak Houthi selama lima tahun. Houthi didukung oleh Iran sementara koalisi Saudi melibatkan negara Uni Emirat Arab. Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk berhenti berperang dengan pemberontak Houthi di Yaman karena pandemi [virus Corona](#) (COVID-19) semakin

parah, sehingga langkah pencegahan harus segera dilakukan di Yaman. Adapun durasi gencatan senjata yang disepakati antara Arab Saudi dan Houthi adalah dua pekan. Keputusan gencatan senjata tersebut tidak datang begitu saja. Sekjen PBB Antonio Guterres yang mendesak Arab Saudi untuk melakukan gencatan. Pandemi virus Corona yang dijadikan alasan Guterres untuk membujuk Arab Saudi melakukan gencatan senjata. Malki mengatakan, adanya gencatan senjata bukan hal yang sepenuhnya negatif. Selain pemerintah Arab Saudi jadi bisa mencegah penyebaran virus Corona, situasi tersebut juga memungkinkan kedua pihak mulai mendiskusikan kesepakatan damai permanen (<https://dunia.tempo.co/read/1329932/arab-saudi-lakukan-gencatan-senjata-di-yaman-karena-corona/full&view=ok>).

Perkembangan terakhir adalah Kelompok Houthi di Yaman menembakkan rudal dan berhasil mencapai ibu kota Arab Saudi pada Selasa untuk pertama kali sejak gencatan senjata yang diberlakukan selama pandemi virus corona berakhir bulan lalu. Dua ledakan besar bisa terdengar di Riyadh menjelang fajar dan asap mengepul ke langit, menurut laporan Reuters, 23 Juni 2020. Houthi mengatakan mereka telah menyerang kementerian pertahanan Arab Saudi dan pangkalan militer, sementara koalisi militer yang dipimpin Saudi mengatakan mereka telah menembak jatuh rudal Houthi, namun tidak mengatakan target yang diserang.

Houthi telah berulang kali menembaki Arab Saudi selama konflik, tetapi tidak menargetkan Riyadh sejak akhir Maret, ketika Arab Saudi mengatakan menembak jatuh rudal dan dua warga terluka oleh puing rudal

yang jatuh di ibu kota. Pertempuran kedua pihak terjadi setelah gencatan senjata enam minggu pandemi Covid-19 berakhir bulan lalu. Koalisi yang dipimpin Saudi, yang telah berperang melawan Houthi selama lebih dari lima tahun, biasanya menanggapi serangan Houthi dengan serangan udara. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa kelompok itu menembakkan beberapa rudal dan drone, yang menggempur markas dan pusat militer di Riyadh, termasuk kementerian pertahanan dan Pangkalan Udara Raja Salman. Sarea mengatakan serangan juga diluncurkan terhadap situs militer di kota Najran dan Jizan di Saudi selatan.

Belum ada konfirmasi apakah ada rudal mencapai target di Riyadh. Juru bicara koalisi yang dipimpin Saudi, Kolonel Turki al-Maliki mengatakan serangan terhadap Riyadh adalah "aksi permusuhan yang disengaja yang dirancang untuk menargetkan warga sipil". Koalisi juga menembak jatuh tiga rudal menuju Najran dan Jizan dan sejumlah drone, katanya. Namun, al-Maliki tidak mengomentari target di Riyadh yang disebut telah digempur oleh Houthi. Sementara di Yaman selatan, bentrokan pecah antara pasukan pemerintah yang didukung Saudi dan separatis selatan, faksi-faksi dalam koalisi anti-Houthi yang saling bertikai, meskipun ada gencatan senjata di antara mereka yang ditengahi oleh Riyadh. (<https://dunia.tempo.co/read/1357119/houthi-serang-ibu-kota-arab-saudi-untuk-pertama-kali-sejak-covid>).

BAB II

POLITIK KONTEMPORER SUKU KURDI

II.1 Sejarah Kurdi

Suku Kurdi adalah salah satu penduduk asli dataran Mesopotamia dan kawasan dataran tinggi yang kini terdapat di bagian tenggara Turki, timur laut Suriah, utara Irak, barat laut Iran dan barat daya Armeni. Suku Kurdi adalah kelompok etnis keempat terbesar di Timur Tengah dengan jumlah sekitar 25 hingga 35 juta orang. Mereka membentuk komunitas yang berbeda, yang disatukan oleh ras, budaya dan bahasa. Meskipun sebagian besar mereka menganut Islam-Sunni, tetapi ada pula yang menganut agama berbeda, termasuk Kristen, Yahudi, Yazidi dan Zoroastrian. Suku Kurdi dianggap sebagai kelompok etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Setelah Perang Dunia Pertama dan kekalahan Kekaisaran Ottoman, sekutu Barat yang menang membuat ketentuan dalam Perjanjian Sevres tahun 1920 tentang pembentukan negara Kurdi, yang dikenal sebagai "Kurdistan". Namun harapan mereka musnah tiga tahun kemudian ketika Perjanjian Lausanne, yang menetapkan batas-batas Turki modern, tidak membuat ketentuan apapun tentang negara Kurdi dan meninggalkan Kurdi sebagai kelompok dengan status minoritas di empat negara, yaitu Turki, Suriah, Irak dan Iran. Selama lebih dari 80 tahun langkah apapun yang dilakukan suku Kurdi untuk mendirikan negara merdeka mendapat perlawanan keras.

Setelah Perang Teluk I 1991 yang diikuti dengan pemberontakan Kurdi di bagian utara Irak dan pembentukan zona larangan terbang, suku Kurdi berhasil membentuk kawasan semi-otonom. Perang Teluk II 2003, yang menggulingkan Saddam Hussein, membuat suku Kurdi dapat mengkonsolidasikan kemajuan-kemajuan yang diperoleh itu di kawasan otonomi yang cukup besar di bagian utara Irak. (<https://www.liputan6.com/global/read/4090125/mengenal-kurdi-etnis-terbesar-di-dunia-yang-tengah-digempur-turki>)

Kurdi hidup di tanah Kurdistan saat ini. Kurdistan sekarang dalam batas-batas politik lima negara, yaitu Turki, Irak, Iran, Suriah dan Armenia. Populasi mereka secara keseluruhan pada tahun 2002 adalah 28 juta orang. Mereka menyebar di Turki 15 juta, di Iran 6 juta, di Irak 5 juta, di Suriah satu juta, serta di Azerbaijan dan Armenia satu juta orang. Asal usul Kurdi adalah orang Arya dari sekelompok orang Indo-Eropa dari keluarga Iran, yang mencakup masyarakat Kurdi, Persia dan Afghanistan. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Kurdi. (Kiblat.net. Ini Sejarah Kurdi Sejak Era Khalifah Rasyidah sampai Revolusi Suriah. 30 Oktober 2014)

Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah, sama halnya dengan kelompok etnis lainnya seperti etnis Arab, Turki, Yahudi, dan Persia yang sekarang merujuk pada negara Iran. Bedanya, mereka tak memiliki wilayah yang berdaulat. Wilayah yang mereka sebut sebagai Kurdistan bukanlah sebuah negara resmi yang diakui dunia. Melihat populasinya, suku

bangsa Kurdi tidak bisa dipandang sedikit. Menurut data World Factbook yang diselenggarakan oleh CIA tahun 2015, ada 14,5 juta orang Kurdi yang mendiami Turki. Kedua ada di Irak sebesar 7 juta orang, disusul di Iran sebesar 6 juta orang, dan Suriah sebanyak 2,5 juta orang. Ribuan penduduk Kurdi lainnya masing-masing tersebar di negara-negara Eropa, Amerika, Asia Timur. Terkecil penduduknya berjumlah 7000 orang mendiami benua Australia. Wilayah Kurdi, yang juga disebut Kurdistan berada di irisan antara negara Turki (Kurdi Utara), Iran (Kurdi Timur), Irak (Kurdi Selatan), dan Suriah (Kurdi Barat). Wilayah terbesar berada di Turki (<https://tirto.id/kurdi-bangsa-tanpa-negara-bCPl>)

Suku Kurdi sempat mengecap masa keemasan dalam sejarah mereka. Mereka memiliki seorang tokoh pejuang dan pemimpin yang luar biasa seperti Shalahuddin al- Ayyubi, ada juga seorang ilmuwan dan pahlawan semisal Ibnu Taimiyah yang buku-bukunya menjadi rujukan para penuntut ilmu agama hingga hari ini (Sahide, 2013.139).

II.2 Pemberontakan Kurdi di Timur Tengah

Dalam beberapa tahun terakhir, nama Suriah dan ISIS mulai mengisi perbincangan dunia mengenai Timur Tengah. Aksi-aksi brutal dan propaganda kelompok militan ISIS yang dilakukan berskala transnasional menjadi pemicu naiknya pamor mereka. Yazidi dan Kurdi yang juga menjadi korban kebrutalan turut muncul di permukaan

(<https://www.liputan6.com/global/read/4090125/mengenal-kurdi-etnis-terbesar-di-dunia-yang-tengah-digempur-turki>)

Dalam beberapa tahun ini, pertempuran melawan kelompok teror ISIS telah memberi peluang bagi suku Kurdi untuk tampil lebih jauh di panggung internasional. Suku Kurdi termasuk suku minoritas yang mendiami beberapa negara di Timur Tengah, seperti Irak, Iran, Turki, dan sebagian wilayah Suriah. Keberadaan suku Kurdi ini menjadi bagian dari konflik etnis di Timur Tengah yang tergolong berlangsung cukup lama. Suku Kurdi selalu menjadi korban dari rezim penguasa di negara-negara yang mereka diami.

II.2.1 Kurdi di Iran

Iran dikenal sebagai negara para Mullah dan termasuk salah satu negara utama yang didiami oleh kelompok suku Kurdi. Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Iran juga termasuk negara yang terdiri dari banyak suku dan agama. Etnik mayoritas ialah etnik Persia (51% dari rakyatnya,) dan 70% rakyatnya adalah bangsa Iran, keturunan orang Arya. Kebanyakan penduduk Iran berkomunikasi dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuk bahasa Persia. Kumpulan minoritas Iran ialah Azeri (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%),

Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%) Turkmen (2%), dan juga suku suku lain (1%) (Sahide ,2013.140- 143)

Kurdi di Iran telah memberontak lebih dari sekali terhadap pemerintah Iran, terutama antara 1920-1925 Masehi. Kurdi menang atas Iran, hingga memaksa Iran untuk memita bantuan kepada Irak dan Turki. Kedua negara mengirimkan pasukan untuk mendukung Iran, yang mengakibatkan kekalahan Kurdi. Kurdi mendirikan negara dengan bantuan Uni Soviet di utara Iran pada tahun 1946, tetapi Shah Iran, dan dengan bantuan Barat mampu mendominasi mereka pada 1956. Dengan munculnya otoritas ulama setelah kepergian Shah Iran pada tahun 1979, Soviet membantu Kurdi Iran dan mempersenjatai mereka untuk membentuk sebuah negara. Tujuan Soviet adalah untuk mengontrol atas sumur minyak Iran. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Iran dan membantunya dalam mengatasinya. (Kiblat. Net, 2014)

II.2.2 Kurdi di Irak

Data pada bulan Juli 2006 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Irak ialah 26.783.383. Antara 75 hingga 80 persen penduduk Irak adalah bangsa Arab; kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak dll (5%), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Penduduk Kurdi di Irak utara tersebar di Irbil, Sulaimaniyah, Dohuk dan sebagian kecil di Kirkuk. Lebih dari 97% dari mereka beragama Islam. Sisanya tinggal di Armenia. Sebanyak 96% dari mereka adalah muslim Sunni.

Sisanya adalah Syiah, sekuler, dan komunis, sebagaimana mereka disebut di sana. Irak dianggap sebagai pusat ketidakadilan terhadap rakyat Kurdi. Setelah perang Iran-Irak berakhir, media melaporkan upaya genosida Saddam Hussein terhadap Kurdi dengan gas beracun, bom Napalm, dan penghapusan kota dan seluruh desa dari keberadaannya, seperti kota Halabjah di timur Sulaimaniyah. Kurdi dituduh mendukung Iran dalam perang melawan Irak selama Perang Teluk pertama.

Terlepas dari Deklarasi Pemerintah Irak pada tahun 1974 bahwa orang-orang Kurdi memiliki hak untuk pemerintahan sendiri, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Buktinya revolusi Kurdi dihadapi dengan pembunuhan dan genosida. Sebagai hasilnya klan kepemimpinan Kurdi mengumumkan berakhirnya permusuhan bersenjata. Warga Kurdi memiliki pilihan antara kembali ke Irak dan imigrasi ke Iran. Hal ini telah menyebabkan pecahnya ikatan Partai Demokrasi Kurdistan (PPK). Partai ini sebelumnya telah mengumpulkan semua kelas masyarakat Kurdi di bawah kepemimpinan Mullah Mustafa Barzani, yang melarikan diri ke Amerika Serikat sampai ia meninggal pada tahun 1975. Kemudian sejumlah besar dari mereka pindah ke Kurdistan Iran dan Turki. (Sahide, 2014. 142 dan Kiblat. Net , 2014)

Pada masa kekuasaan Saddam Husain, suku Kurdi berkali-kali berhadapan dengan pembantain oleh rezim Saddam. Keberadaan suku Kurdi yang non-Arab itu ternyata menjadi hambatan tersendiri bagi Saddam Husein

dalam menjalankan obsesinya menggelorakan semangat nasionalisme Arab. Bahkan pada tahun 1988, tercatat bahwa dua kali Saddam melakukan pembantaian dengan menggunakan senjata kimia terhadap suku Kurdi ini. Hal itu dilakukan oleh Saddam karena selama perang Iran-Irak, warga Kurdi Irak justru berpihak kepada pasukan Ayatullah Khomeini dan memerangi pasukan Saddam Hussein. (Sihbudi,1991.35)

Kurdi telah dan terus menuntut sebuah negara merdeka bagi mereka. Mereka mencobanya setelah Perang Teluk pertama pada tahun 1991. Situasi politik Kurdi setelah Perang Teluk 1991 berbeda dari sebelumnya. Pemerintahan Irak dan pasukan AS menandatangani kesepakatan untuk memberikan provinsi di Irak utara sebagai provinsi yang berdiri sendiri bagi Kurdi dan menjadi zona larangan terbang bagi pesawat Irak. Maka tanda-tanda yang mengarah kepada pemerintahan federal Kurdi mulai terbentuk saat itu. Ada dua pihak Kurdi yang berkuasa di bawah kepemimpinan Mas'ud Barzani dan Jalal At-Talibani. Dua tokoh ini memimpin dengan orientasi sekuler. Pada tahun 1994, Sayyid Salahuddin Muhammad Bahauddin bersama dengan elit Muslim dari pemuda Kurdi membentuk sebuah organisasi Islam yang disebut Persatuan Islam Kurdistan. Organisasi ini mengadopsi gagasan pembaruan Islam tanpa kekerasan, memakai cara-cara damai dan dialog dengan tokoh-tokoh Kurdi tentang kondisi sulit yang dialami oleh Kurdi selama ini. Meskipun perwakilan mereka ada di parlemen Kurdistan dan parlemen Irak saat itu, apa yang mereka lakukan tidak disukai oleh banyak analis politik dan pengamat realitas Islam.(Kiblat. Net , 2014).

Di Irak, sampai sekarang suku Kurdi dianggap sebagai gerakan separatis yang merongrong kedaulatan Irak. Mereka ditengarai akan memisahkan diri dari kedaulatan Irak atau bahkan merebut kekuasaan di Irak dengan melakukan pemberontakan. Dampak dari keresahan pemerintah Irak terhadap ancaman Kurdi ini adalah pembekuan akses-akses Kurdi yang diyakini berpotensi untuk merebut kekuasaan. Partai buruh kurdi yaitu PKK dibekukan oleh Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki ia mengatakan, “PKK adalah organisasi teroris dan kami sudah mengambil keputusan untuk menutup kantor-kantor perwakilan mereka dan tidak mengizinkan mereka beroperasi lagi di wilayah Irak”. (<http://eramuslim.com/berita/dunia/irak-galang-kekuatan-dengan-turkiberangus-kelompok-bersenjata-kurdi.html>)

II.2.3 Kurdi di Turki

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak saat itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Dibandingkan dengan Irak dan Iran, populasi suku Kurdi di Turki adalah yang terbesar, jumlahnya mencapai 30 juta jiwa. (Internationale. 1/3. 2008.)

Populasi Kurdi di Turki terkonsentrasi di daerah pegunungan timur di sekitar provinsi Diyarbakir. Mereka berpartisipasi dalam penaklukan bersama Kekaisaran Turki Utsmani (Kiblat. Net. 2104). Di Turki, orang-orang Kurdi

tiga kali melancarkan pemberontakan secara besar-besaran, yaitu pada 1925, 1930, dan 1937. Semua pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan total, sehingga banyak orang Kurdi yang dibantai maupun yang dideportasi oleh rezim Ankara. Pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi sebagai bentuk penentangannya yang paling keras terhadap sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Oleh karena itu, mereka menuntut pengembalian Islam kepada statusnya yang lama. Permintaan lainnya adalah otonomi lokal (Lenczowski. 1993. 84)

Pemerintahan sekuler, akhirnya, di bawah Mustafa Kemal Attaturk, yang menggantikan Dinasti Usmaniah, berhasil menyatukan orang-orang Turki dan Kurdi. Rezim Ankara mengkombinasikan kebijakan represif dan integrasi terhadap suku Kurdi. Sehingga, secara resmi tidak orang-orang Kurdi di Turki. (Sihbudi.1991.137-138). Pascakemerdekaan Irak tahun 1932, bangsa Kurdi semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Mereka yang mendiami daerah-daerah perbatasan ini selalu menjadi korban pertikaian antara Irak, Iran, dan Turki. Karena frustrasi atas semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militant Kurdi yang kerap melancarkan aksiaksi terorisme. (Internationale. 1/3. 20080)

Berbeda dengan di Irak, di Turki nasionalisme Kurdi menginginkan otonomi, bukan pemisahan, karena kebanyakan suku Kurdi di sana memiliki saham dalam sistem ekonomi dan politik dan menginginkan peningkatan dalam hak-hak kewarganegaraan dan politik mereka ketimbang perpisahan. Meski demikian, mereka masih mengagumi prestasi simbolis suku Kurdi Irak:

Bendera tiga warna Kurdi dengan matahari keemasan di tengahnya, ritual masyarakat umum untuk menghormati para pahlawan Kurdi, dan pengadopsian bahasa Kurdi sebagai bahasa resmi. (Sahide, 213.145)

Kemal Attaturk, enggan mengakui nasionalisme Kurdi, yang mengakibatkan pemberontakan Kurdi dan pembentukan partai-partai Kurdi. Terutama Partai Buruh Kurdistan (PKK) di Turki. Pemerintah Turki benar-benar menolak nasionalis Kurdi maupun hak perwakilan mereka di parlemen. Rezim benar-benar menolak mentah-mentah semua tuntutan Kurdi dalam representasi sosial, budaya dan politik. Padahal persentase mereka adalah 25% dalam masyarakat Turki. Bahkan rezim juga mengabaikan tuntutan mereka untuk pembangunan ekonomi di daerah-daerah Kurdi (Kiblat. Net, 2014) Serangan terhadap suku Kurdi yang terakhir kalinya adalah Serangan besar-besaran militer Turki pada bulan Februari 2008 ke basis milisi Kurdi di Pegunungan Qandil yang menewaskan ratusan jiwa dari kelompok Kurdi. (Internationale. 1/3. 2008)

Dikabarkan Amerika Serikat (AS) sendiri ikut terlibat dalam operasi yang digelar hingga wilayah Irak Utara. Serangan militer yang dibungkus dengan slogan memerangi terorisme memang didukung oleh AS dan Uni Eropa. Mengingat salah satu faksi Kurdi yang ada di Turki bagian tenggara yaitu *Partiye Karkaren Kurdistan* (Partai Pekerja Kurdistan, PKK) telah dimasukkan dalam daftar kelompok teroris internasional. Kelompok Kurdi pro AS di Irak Utara juga membiarkan serangan ke wilayahnya karena adanya

konflik yang terjadi di antara mereka. Bangsa Kurdi yang mendambakan kemerdekaan sejak hampir seabad lamanya, kini nasibnya semakin tidak menentu. Hidup berserak sebagai minoritas di antara wilayah Turki, Iran, Irak dan sebagian kecil di Siria. Nampaknya, operasi militer Turki ke wilayah Kurdi pada tahun 2008 tersebut diyakini akan semakin menciptakan eskalasi kekerasan di kawasan Timur Tengah. (Sahide, 2013. 145)

II.2.4 Kurdi di Negara Lainnya

Suku Kurdi di Suriah Populasi Kurdi di Suriah terkonsentari di provinsi Hasakah (di perbatasan Suriah-Turki), provinsi Aleppo di wilayah Ain Arab (termasuk Kobani yang saat ini sedang mereka pertahankan dari serangan ISIS) dan Afrin, dan di provinsi Raqqah. Rezim Suriah telah menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap mereka. Statistik mereka di Hasakah sangat besar pada tahun 1962, namun 120 ribu Kurdi dihapus dari kebangsaan Suriah mereka. Mereka juga dilarang berbicara dengan bahasa Kurdi di sekolah dan lembaga-lembaga publik. Di beberapa wilayah mereka menghadapi insiden kekerasan, di antara yang paling penting adalah peristiwa Qamisyli 12 Maret 2004, dan pembunuhan ulama terkemuka Muhammad Ma'syud Al-Khaznawi" pada 30 Mei 2005. (Kiblat. Net, 2014)

Sedangkan suku kurdi lainnya berada di Armenia, Aerbaijan, dan Georgia. Uni Soviet melihat Kurdi di wilayah ini sebagai entitas anti-komunis. Karena dalam pandangan Uni Soviet ketika itu, mereka adalah ekstrimis Muslim yang dikenal dari kepatuhan mereka kepada ajaran

agamanya. Soviet mencoba untuk mengubah loyalitas Kurdi agar mendukung tujuan strategisnya dan menyiarkan gagasan-gagasan atheis di tengah-tengah mereka.

Koordinator Umum Dewan Revolusi Suriah Kurdi, Faris Mashaal Tammo, dalam wawancara dengan wartawan senior Al-Jazirah, Tayser Alluni, pada tanggal 29 Juli 2013 lalu, mengatakan bahwa mayoritas Kurdi mendukung revolusi Suriah. Mereka menuntut hak-haknya dalam kerangka bangsa. Selama ini, seperti dijelaskannya, Kurdi dilarang dari segala sesuatu, mereka kehilangan pekerjaan, kebangsaan, kepemilikan dan akuisisi, serta posisi politik dan militer. Mereka ingin hak-hak konstitusional Kurdi dilindungi dalam rangka kebangsaan. Faris Mashaal Tammo menjelaskan, ada tiga keberpihakan dalam revolusi Suriah.

Pertama adalah Partai Persatuan Demokrasi, sayap militer Kurdi Suriah dari Partai Buruh Kurdi (PKK) di Turki. Mereka kembali ke Suriah dengan dukungan dan dana dari rezim Bashar untuk membantunya dalam menindas demonstran, penangkapan, dan pembunuhan aktivis. Pihak kedua adalah Dewan Nasional Kurdi, yang memilih untuk bersikap netral dan benar-benar jauh dari Revolusi selama enam bulan pertama pembentukannya. Tetapi setelah sisa partai Kurdi lainnya disatukan ke dalam Dewan Nasional Kurdi, mereka memilih untuk menjadi pihak ketiga dalam revolusi. (kiblat. Net, 2014)

Dewan Nasional Kurdi lahir dari sikap para pemuda Kurdi dalam revolusi Suriah sebagai front politik bagi gerakan Kurdi, yang mencita-citakan negara merdeka. Namun, Faris melihat lembaga ini tidak berjalan dengan baik. Pihak ketiga adalah Dewan Revolusi Suriah Kurdi. Lembaga ini mewakili kelompok Kurdi yang berpihak kepada oposisi sejak awal dan masih berlanjut. Namun, mereka mengalami pemisahan dan marjinalisasi oleh Dewan Nasional Kurdi dan Dewan Nasional Suriah (SNC). Mashaal Tammo menegaskan bahwa Dewan Revolusi Suriah Kurdi turut andil dalam kegiatan militer, dan memiliki link ke dalam jajaran Tentara Pembebasan Suriah (FSA).

II.3 Politik Kontemporer Kurdi di Irak dan Revolusi Suriah

Suku Kurdi di Irak dan Suriah terlibat dalam perang melawan ISIS. Ribuan warga Kurdi tewas di medan tempur. Keterlibatan aktif Kurdi untuk mengakhiri kekhalifahan ISIS membuat mereka meraih reputasi global sebagai salah satu pasukan darat paling efektif melawan kelompok teror itu. Pada September 2014, ISIS melancarkan serangan terhadap salah satu benteng perlawanan di sekitar kota Kobani di bagian utara Suriah, memaksa puluhan ribu orang melarikan diri melintasi perbatasan Turki. Pada Januari 2015, setelah pertempuran yang menewaskan sedikitnya 1.600 orang, pasukan Kurdi berhasil merebut kembali Kobani. Suku Kurdi, yang dalam pertempuran itu menggunakan nama Pasukan Demokratik Suriah SDF, bertempur bersama sejumlah milisi lokal Arab dan membantu pasukan koalisi udara pimpinan Amerika. Mereka berhasil mengusir ISIS dari wilayah yang

cukup luas di Suriah dan membangun kendali atas wilayah di sepanjang perbatasan dengan Turki

(<https://www.liputan6.com/global/read/4090125/mengenal-kurdi-etnis-terbesar-di-dunia-yang-tengah-digempur-turki>)

Awal Agustus 2014, kota Sinjar menjadi saksi kebrutalan ISIS. Pasukan Peshmerga tidak mampu lagi membendung kekuatan ISIS yang terus merangsek masuk. Kota itu, yang sebelumnya dihuni oleh etnoreligi Yazidi dan masih dalam bagian dari bangsa Kurdi, menjadi sepi dan hampir kosong. Data dari hasil laporan OHCHR dan UNAMI menyebutkan, ISIS telah membantai hingga 5.000 orang Yazidi selama bulan Agustus, 2014. Sedangkan data dari Pemerintah Daerah Kurdistan Irak pada Desember 2014 memperkirakan total jumlah Yazidi yang tewas atau hilang mulai dari laki-laki, perempuan dan anak-anak asal Sinjar sebanyak 4.000 orang. Banyak dari pejuang Kurdistan dari berbagai daerah turun ke Kobani untuk menumpas ISIS sekaligus sebagai momentum mengukuhkan wilayah teritorial mereka. Tercatat, ada Kurdi Suriah, Irak Suriah, Partai Pekerja Kurdi bergabung melawan ISIS. Kesuksesan memukul mundur dan merebut kembali wilayah berpihak pada pejuang Kurdi. ISIS dipukul mundur hingga berhasil menguasai kembali Kobani. Meskipun pasukan Kurdi berhasil, tetapi pembantaian Kobani juga terjadi. ISIS menembaki laki-laki, perempuan sampai anak-anak dari etnis Kurdi. Human Right Watch merilis, 233 sampai 262 warga sipil Kurdi tewas dan sedikitnya 273 terluka.

Presiden Donald Trump pada 6 Oktober lalu menindaklanjuti keinginannya untuk menarik mundur pasukan Amerika dari timur laut Suriah. Ini merupakan perintah kedua setelah perintah penarikan pertama pada Desember 2018. Penarikan mundur pasukan Amerika itu memungkinkan pasukan Turki dan proksi mereka melancarkan serangan militer terhadap milisi pimpinan Kurdi pada 9 Oktober. Keputusan Trump memicu kekhawatiran luas bahwa serangan Turki akan menghancurkan kelompok Kurdi dan membuat sekitar 11 ribu militan ISIS yang dipenjara di daerah itu melarikan diri. Seminggu setelah pengumuman Trump itu, Turki merebut lebih dari 194 kilometer per-segi wilayah yang sebelumnya dikuasai Kurdi. Amnesty Internasional menuduh tentara Turki dan proksinya telah melakukan kejahatan perang selama operasi militer itu. Turki membantah tuduhan tersebut. (<https://www.liputan6.com/global/read/4090125/mengenal-kurdi-etnis-terbesar-di-dunia-yang-tengah-digempur-turki-Suriah>)

Ketidakstabilan di kawasan itu dinilai dapat menguntungkan ISIS karena meskipun kelompok Kurdi melawan serangan Turki --terutama di kota-kota di perbatasan-- mereka tidak lagi mampu menghadapi sel-sel militan ISIS itu. Namun demikian otoritas Kurdi, untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima tahun, mengizinkan pasukan Suriah kembali ke bagian utara Suriah. Belum jelas apakah tentara Suriah akan mempertahankan daerah itu atau membuat Kurdi memiliki otorita sipil. Penarikan mundur pasukan Amerika juga membuat Rusia dan Iran meningkatkan pengaruh mereka di kawasan itu. Rusia telah menjadi mediator utama dalam perundingan-

perundingan antara Kurdi, Presiden Suriah Bashar Al Assad dan pemerintah Turki. Suku Kurdi mengelola lebih dari sepuluh kamp yang menampung puluhan ribu pengungsi. Ofensif Turki diperkirakan menggusur puluhan ribu orang yang kini melarikan diri ke selatan.

(<https://www.liputan6.com/global/read/4090125/mengenal-kurdi-etnis-terbesar-di-dunia-yang-tengah-digempur-turki>)

BAB III

POLITIK KONTEMPORER BAHRAIN

III.1 Sejarah Bahrain

Bahrain (= mempunyai arti Dua Lautan) sebagai bagian dari peradaban kuno “Dilmun”. Karena letaknya yang strategis, sejak 3000 tahun SM sudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Mesopotamia, Mesir, Assyria dan India. Dalam perkembangan selanjutnya Bahrain menjadi tempat persinggahan dan penghubung utama perdagangan antara Sumeria dan Lembah Indus. Sejak akhir abad 18, Bahrain telah diperintah oleh keluarga Al Khalifa yang masih satu keturunan dengan suku bani Utbah yang menguasai Bahrain sejak abad ke-18

(Bahrain. <https://kemlu.go.id/manama/lc/read/bahrain/1469/etc-menu>)

Bahrain hingga tahun 1521 terdiri dari daerah Ahsa (yang lebih besar), Qatif (keduanya kini menjadi propinsi timur Arab Saudi), serta Awal (kini pulau Bahrain). Daerah Bahrain terbentang hingga (kini) Kuwait hingga Oman dan dinamakan Propinsi Bahrain (atau *Iqlim Al-Bahrain*). *Namun pada 1521, kedatangan Portugis telah memisahkan Awal (kini Bahrain) dengan daerah lainnya dan hingga kini Bahrain dikenal sebagai wilayah yang dikenal sekarang. Dari abad ke-16 Masehi hingga tahun 1743, pemerintahan Bahrain sentiasa berubah-ubah di antara Portugis dan Persia. Akhirnya, Sultan Persia, Nadir Shah menguasai Bahrain dan atas alasan politik mendukung mayoritas Syiah*

(https://www.kompasiana.com/bakaruddin_is/550083c7a33311bb745113b3/virus-revolusi-itu-telah-melanda-bahrain)

Pada lewat abad ke-18 Masehi Keluarga Al-Khalifah mengambil alih pulau ini. Untuk menjaga agar pulau ini tidak jatuh kembali ke tangan Persia, mereka menjalin persahabatan dengan Britania Raya dan menjadi negeri dibawah naungan Britania. Minyak ditemukan pada tahun 1931 dan sejak itu Bahrain dibangun dan mengalami modernisasi pesat. Hal ini juga menjadikan hubungan dengan Britania Raya lebih baik dan dibuktikan dengan makin banyaknya pangkalan-pangkalan Inggris yang pindah ke pulau tersebut. Pengaruh menguat seiring dengan makin berkembangnya negara ini, puncaknya saat Charles Belgrave dilantik menjadi penasihat. Belgrave kemudian mengukuhkan sistem pendidikan modern sebagai bagian pendidikan di Bahrain.

Setelah Perang Dunia II, sentimen anti-Inggris menguat di wilayah-wilayah Arab dan mengakibatkan terjadinya kerusuhan di Bahrain. Pada tahun 1960-an, pihak Inggris menyerahkan masa depan Bahrain pada Arbitrase internasional dan meminta agar PBB mengambil alih tanggung jawab. Pada tahun 1970, Iran terus menerus menuntut haknya terhadap Bahrain dan pulau-pulau lain di Teluk Persia, namun salah satu perjanjian dengan pihak Britania Raya, mereka kemudian setuju untuk tidak meneruskan tuntutan mereka terhadap Bahrain jika tuntutan (Iran) lainnya dikabulkan. Britania Raya mundur dari Bahrain pada bulan Agustus 1971, menjadikan Bahrain sebagai sebuah negara 'merdeka'.

https://www.kompasiana.com/bakaruddin_is/550083c7a33311bb745113b3/virus-revolusi-itu-telah-melanda-bahrain

Tahun 1820, Bahrain di bawah pimpinan Shaikh Sulman dan Abdullah menandatangani perjanjian dengan Inggris yang dikenal dengan “The General Treaty of Peace”. Perjanjian menyebutkan bahwa penguasa Bahrain tidak dibenarkan mengatur teritorial kecuali dengan Inggris dan tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pemerintahan asing manapun tanpa izin dari Inggris. Sementara itu Inggris berjanji akan melindungi Bahrain dari segala agresor. Pada tahun 1968 Bahrain bergabung dengan delapan negara lain (Qatar dan tujuh Trucial Shaikhdoms, yang sekarang dikenal PEA) di bawah perlindungan Inggris dalam usaha untuk membentuk Uni Arab Emirates. Karena pertentangan yang tidak terselesaikan khususnya menyangkut kekuasaan diantara kesembilan Shaikhdoms, Bahrain melepaskan diri mencari kemerdekaan dan baru pada tanggal 15 Agustus 1971, Bahrain menjadi sebuah negara yang merdeka penuh dan sekaligus secara resmi mengakhiri hubungan khusus dengan Inggris mengenai tanggung jawab atas pertahanan dan urusan luar negeri Bahrain.

Bertepatan dengan peringatan satu tahun pelaksanaan referendum nasional pada tanggal 14 Pebruari 2002, Amir Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa secara resmi mendeklarasikan perubahan nama negara dari “Negara Bahrain” menjadi “Kerajaan Bahrain” (Kingdom of Bahrain) yang menganut sistem Monarki Konstitusional Demokrasi dan untuk selanjutnya Shaikh

Hamad bin Isa Al Khalifa disebut sebagai “Raja Bahrain” (King of Bahrain) yang bertindak sebagai Kepala Negara.

(Bahrain. <https://kemlu.go.id/manama/lc/read/bahrain/1469/etc-menu>).

III.2 Konflik di Bahrain

Kaum Syiah di Bahrain, dilarang menempati posisi penting di pemerintahan, kepolisian atau kemiliteran. Pemerintah juga dilaporkan merekrut banyak warga Sunni dari negara-negara di kawasan, yaitu Suriah, Pakistan dan Balukistan, untuk menjadi pasukan keamanan. Mereka kemudian mendapatkan kewarganegaraan Bahrain dengan mudah. Diskriminasi pemerintah terhadap kaum Syiah membuat banyak warga Syiah marah. Bahrain yang tanpa minyak memiliki angka pengangguran yang tinggi dan sedikitnya kesempatan bagi para pemuda. Ditambah lagi dengan perpecahan sektarian, dengan mayoritas populasi Syiah telah sejak lama menjadi warga kelas dua bagi para penguasa Sunni (https://www.kompasiana.com/bakaruddin_is/550083c7a33311bb745113b3/virus-revolusi-itu-telah-melanda-bahrain). Sejak merdeka dari Inggris pada 1971, ketegangan antara elit Sunni dan penganut Syiah menimbulkan kerusuhan. Kelompok Syiah menyatakan mereka dipinggirkan, mendapat ketidakadilan hukum dan ditekan. Konflik berkurang pada 1999, ketika Sheikh Hamad menjadi pangeran. Dia membebaskan tahanan politik dan mengizinkan pelarian politik yang berada di pengasingan untuk kembali ke Bahrain dan menghapus aturan yang membolehkan pemerintah untuk

menahan seseorang tanpa pengadilan selama tiga tahun . Pada Februari 2011, Ribuan orang menggelar demonstrasi anti pemerintah di ibukota Bahrain. Para pemrotes menuntut reformasi politik di negara di kawasan Timur Tengah itu. Protes terhadap pemerintah di Bahrain, merupakan bagian dari gelombang demonstrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah beberapa waktu terakhir ini. Pemerintah kerajaan sunni berkuasa sejak abad ke 18, di negara yang mayoritas penduduknya menganut syiah ini. (https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110217_bahrain.amp)

Bahrain menjadi pusat bagi perebutan pengaruh antara Sunni dan Syiah, dengan jumlah pengikut Syiah yang mencapai 70-75%. Pada tahun 2011 terjadi *Arab Spring* yang memicu gelombang demonstrasi di Bahrain yang menyebabkan negara tersebut lumpuh. Kelompok Syiah yang didukung oleh Iran dan sekutunya melancarkan demonstrasi yang mendesak penggulingan pemimpin Sunni di wilayah tersebut. Menghadapi situasi yang berkembang maka pemimpin Arab Saudi bersama dengan Uni Emirat Arab melalui bendera Gulf Cooperation Council (GCC) memutuskan untuk masuk ke Bahrain dan mengendalikan demonstrasi yang terjadi. Dalam tindakan ini Arab Saudi menjadi pihak yang paling banyak mengirimkan pasukan sehingga terlihat Arab Saudi merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini.

Momentum terjadi ketika dunia Arab dilanda revolusi pada tahun 2011. Gelombang revolusi ini menjalar hingga hampir seluruh negara Arab yang kebanyakan dipimpin oleh diktator atau monarki yang telah berkuasa

selama beberapa dekade. Bahrain menjadi salah satu negara yang terdampak langsung revolusi musim semi Arab pada tahun 2011. Komunitas Syiah di Bahrain menuntut untuk diturunkannya penguasa monarki dan dibukanya akses lebih besar kepada kekuasaan sebagai bagian proses demokratisasi. Simon Mabon menjelaskan bahwa terdapat dua fakta penting yang menjadikan Bahrain sebagai pusat perebutan antara Arab Saudi dan Iran, yaitu adalah perpecahan sektarian dan campur tangan Saudi-Iran melalui *proxy* di negara tersebut. Perpecahan sektarian menjadi isu pertama karena rakyat Bahrain yang didominasi oleh Syiah, menurut para penguasa monarki negara Teluk harus berada di bawah pemerintahan Sunni yang direpresentasikan dengan kepemimpinan Dinasti Al-Khalifa. Monarki Sunni di Bahrain membatasi ruang gerak bagi golongan Syiah, kelompok ini dihalangi untuk menjabat di instansi strategis di pemerintah dan secara sistematis mengutamakan naturalisasi masyarakat yang beraliran Sunni untuk menjadi warga Bahrain. Arab Saudi juga menjadikan dinasti Al-Khalifa sebagai *proxy* negara tersebut untuk menekan pergerakan kaum Syiah karena kaum Syiah di Bahrain memiliki hubungan erat dengan Syiah yang ada di Timur Arab Saudi. (Mabon. 2012. 87-89 Bayu , 2011) Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang lain percaya dalam demonstrasi yang terjadi di Bahrain terdapat campur tangan Iran. (Friedman,2012.75) Cara ini dianggap memiliki kepentingan untuk menyebarkan revolusi Iran dan pemikiran-pemikiran Ayatollah Khomeini kepada komunitas-komunitas Syiah di Timur Arab Saudi dan Bahrain, juga disaat yang sama mendelegitimasi kekuasaan penguasa Sunni.

Negara-negara Teluk percaya bahwa kemenangan Syiah di Bahrain akan memunculkan gelombang perlawanan lanjutan dari golongan Syiah di Arab Saudi dan Kuwait. (Broner and Slackman , 2011)

Salah satu yang dianggap sebagai ancaman utama dari prinsip Tauhid adalah golongan Syiah. Dasar ideologis ini yang menjadi landasan kekhawatiran ulama-ulama Salafi terhadap kelompok Syiah. Dalam konsepsi Salafi terdapat pembagian sederhana di dunia ini, yaitu yang beriman dan yang kafir. Kelompok yang dianggap menyalahi aturan Sunnah merupakan ancaman terhadap kelompok orang-orang beriman. Kelompok Salafi selalu curiga terutama terhadap kelompok Syiah yang banyak dianggap menyebar bidah dan kesyirikan. (Mabon, 2012. 369). Dalam konsepsi Salafi yang terlihat dari pernyataan-pernyataan ulama-ulama Arab Saudi sebelumnya tampak jelas bahwa mereka memandang kelompok Syiah berusaha untuk berkonspirasi menjatuhkan kelompok Sunni. Fatwa yang dikeluarkan ketika demonstrasi terjadi di Bahrain juga merujuk pada sebuah entitas asing yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, dan berdasarkan situasi yang terjadi entitas yang dirujuk ini adalah kelompok Syiah. (Al. Alawi, 2011)

Demonstrasi besar yang terjadi di Bahrain dengan cepat diintervensi oleh Arab Saudi dengan mengirimkan tentaranya. Pada saat itu para demonstran menduduki Manama (pusat kota Bahrain) dan menjadikannya titik berkumpul puluhan ribu orang sehingga pemerintah Bahrain tidak mampu lagi untuk mengatasi gelombang demonstrasi (Chulov, 2011). Melalui bendera Gulf Cooperation Council Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

mengirim 2.000 pasukan (1.200 dari Arab Saudi dan 800 dari UEA) yang bertugas untuk menertibkan berbagai aksi demonstrasi di Bahrain. (Broner and Slackman , 2011).

Untuk pertama kalinya GCC sebagai organisasi keamanan aktif menggunakan pilihan aksi militer bersama untuk meredam konflik yang ada di salah satu anggotanya. Raja Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan pihak-pihak yang ingin mengobarkan konflik sektarian dan melakukan pecah belah terhadap negaranya (Fadel , 2011).Secara terbuka pemimpin Bahrain menunjuk Iran sebagai dalang dari kekacauan yang terjadi di negaranya, pembuktian ini didapatkan dari kontak informasi antara Al-Alam (stasiun televisi Iran yang berbahasa Arab), Al-Manar (stasiun berita Hezbollah di Lebanon), dan oposisi di dalam negeri yang melakukan agitasi terhadap populasi Syiah di Bahrain (Chulov,2011). Setelah aksi demonstrasi berhasil dihentikan Iran juga secara aktif tetap menyalahkan Arab Saudi sebagai pihak yang melakukan pengingkaran terhadap kedaulatan sebuah negara. Secara tegas pejabat dari Arab Saudi menyatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa Iran terlibat dalam demonstrasi ini. (Broner and Slackman , 2011).

Para demonstran menuntut, pembebasan tahanan politik, pembukaan lapangan kerja dan penyediaan perumahan. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan perwakilan rakyat dan memberdayakan parlemen, meminta konstitusi baru, dan perombakan kabinet yang tidak

melibatkan Perdana Menteri Sheikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa yang telah berkuasa selama 40 tahun.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110217_bahrain.amp

Selama konflik Kecaman internasional terhadap konflik di Bahrain terus bergulir. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Iran menyatakan keprihatinannya atas kekerasan yang dilakukan tentara terhadap pengunjung rasa di Bahrain. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast mengatakan, Bahrain membuat kesalahan strategi dengan menggunakan kekerasan berlebih terhadap demonstran. Ia meminta pemerintah Manama serius mempertimbangkan tuntutan para demonstran. Mehmanparast juga meminta pasukan militer asing segera ditarik dari negara tersebut. Juru bicara tersebut pun mengkritik beberapa Negara Barat, yang mengklaim sebagai pendukung demokrasi dan hak asasi manusia, namun tetap diam melihat kekerasan yang terjadi pada demonstran di Bahrain. Sebelumnya pada Mei 2011 lalu, sekelompok mahasiswa berkumpul di luar kantor PBB di Teheran. Mereka memprotes ketidakpedulian badan internasional terhadap kerusuhan di Bahrain. Selama konflik puluhan demonstran tewas sementara ribuan lainnya terluka dan ditahan pasukan rezim. Demonstran anti-pemerintahan meminta Raja Hamad bin Isa Al Khalifa bertanggung jawab atas kematian demonstran selama pemberontakan tersebut (Iran Menyuarakan Keprihatinan atas Konflik Bahrain.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/m2yhz8>

Kelompok oposisi Syiah terbesar di Bahrain, Wefaq, telah menerima Kuwait sebagai penengah dengan Pemerintah Bahrain untuk mengakhiri krisis politik yang mencekam kerajaan kecil itu, kata seorang anggota Wefaq, Minggu (27/3/2011). Bahrain telah memberlakukan hukum perang dan mengundang tentara dari negara-negara tetangganya yang mayoritas Sunni pada awal bulan ini untuk mengakhiri berpekan-pekan demonstrasi oleh para pemrotes yang sebagian besar Syiah.

([https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/1324244/Kuwait.Jadi.Penengah.Krisis.Bahrain.](https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/1324244/Kuwait.Jadi.Penengah.Krisis.Bahrain))

III. 3 Peran Kuwait Sebagai Mediator

Hussein, seorang anggota Wefaq, mengatakan, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah telah menawarkan diri untuk menjadi penengah antara keluarga Sunni al-Khalifa yang memerintah Bahrain dan kelompok-kelompok oposisi Syiah. "Kami menyambut baik gagasan untuk membawa masuk unsur luar itu," ujar Hasan kepada Reuters. Husain menyatakan, pembicaraan akan membahas masalah-masalah yang diuraikan oleh Putra Mahkota Bahrain Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa sebelum tentara negara Teluk masuk Bahrain. Masalah itu mencakup pemerintah yang dipilih dan perbaikan distrik-distrik pemilihan yang oposisi katakan telah dihentikan untuk menjamin mayoritas Sunni di parlemen. Mayoritas penduduk Bahrain merupakan pemeluk Muslim Syiah, namun negara itu dipimpin oleh keluarga Sunni.

Wefaq dan enam sekutunya mengatakan pada bulan Maret tahun 2011 bahwa mereka tidak akan ikut pembicaraan kecuali pemerintah menarik tentara dari jalanan dan membebaskan para tawanan. Beberapa pengamat menyatakan, Wefaq sekarang telah membatalkan tuntutan itu. "Ini adalah perkembangan politik yang sangat penting dalam upaya yang dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian damai," kata Mansoor al-Jami, redaktur surat kabar oposisi Al-Wasat. (Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) yang dipimpin Sunni, menganggap keluarga yang memerintah Bahrain sebagai benteng pertahanan terhadap kekuatan Syiah regional Iran, telah mengirim tentara ke Bahrain untuk membantunya mengakhiri berpekan-pekan demonstrasi pro-demokrasi. Kuwait, yang memiliki minoritas Syiah-nya sendiri, telah mengirim beberapa kapal angkatan laut ke Bahrain berdasarkan pakta keamanan Teluk untuk mematroli garis pantai utaranya. Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), blok politik dan ekonomi regional yang terdiri atas Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UAE, menyambut baik langkah penengahan itu

(<https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/1324244/Kuwait.Jadi.Penengah.Krisis.Bahrain.>)

Sekjen (GCC) Abdulrahman al-Attiyah kepada wartawan di Kuwait mengatakan bahwa mereka mengharapkan prakarsa itu akan terjadi untuk kepentingan keamanan dan stabilitas. Wefaq dan sekutunya menginginkan dewan yang dipilih untuk merancang kembali konstitusi, tuntutan pada pembicaraan awal dengan Khalifa yang macet tak lama sebelum tentara Teluk

tiba dan Bahrain mengusir demonstran dari jalanan serta melarang pertemuan umum. Lebih dari 60 persen warga Bahrain adalah orang Syiah, dan sebagian besar dari mereka berkampanye untuk monarki konstitusional, tetapi seruan kelompok garis keras bagi penggulingan monarki telah memperingatkan masyarakat Sunni, yang mengkhawatirkan kekacauan itu akan dimanfaatkan oleh Iran, yang terletak di seberang perairan Teluk (<https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/1324244/Kuwait.Jadi.Pengah.Krisis.Bahrain.>) Pasca kerusuhan politik pada Februari dan maret 2011, Pemerintah Bahrain pada 24 September 2011 akan melakukan pemilihan tambahan untuk menggantikan 18 anggota parlemen dari kelompok oposisi Al Wefaq yang mengundurkan diri dari parlemen. Pasca proses reformasi di bidang politik, Perdana Menteri Sheikh Khlaifa bin Salman Al Khalifa menggarisbawahi bahwa pemerintahan dalam era Raja Hamad bin Isa Al Khalifa akan tetap melanjutkan kebijakan yang selama ini tengah dijalankan, seperti penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan, hak-hak dan kepentingan rakyat dalam koridor Konstitusi, penggalakan kerjasama dengan berbagai pihak guna menciptakan iklim yang sehat di mana semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dan memberikan segala kondisi yang memungkinkan bagi semua pihak untuk ikut berpartisipasi demi tercapainya kemajuan dan kemakmuran. Disamping itu pemerintah telah berkomitmen untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama yang konstruktif dengan Dewan Shura dan Majelis Rendah dalam mengemban tugas nasional

tersebut. (Bahrain. <https://kemlu.go.id/manama/lc/read/bahrain/1469/etc-menu>).

Pada bulan Maret 2012, pejabat advokasi Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), John Lubbock, mengatakan situasi di Bahrain kian memburuk. Setiap bulan dilalui tanpa ada rekonsiliasi atau reformasi. “Para pengunjuk rasa dan warga tak berdosa di rumah mereka terus diserang dan dibunuh,” ujar Lubbock dalam surat elektronik kepada Tempo. Lembaga yang berbasis di London, Inggris, ini mencatat 65 orang terbunuh sejak aksi unjuk rasa menentang rezim Al Khalifa merebak di Bahrain pada 14 Februari 2011. Para aktivis ditangkap dan ditahan, termasuk pendiri dan bekas Presiden BCHR Abdulhadi Alkhawaja serta para politikus oposisi seperti Hasan Mushaima (dari partai Syiah Al-Wefaq) dan Ebrahim Sharif (pemimpin Sunni dari partai oposisi liberal Waad). “Mereka masih berada di penjara tanpa tahu kapan jadwal persidangan,” ujarnya. Dia mengatakan jadwal persidangan para dokter yang didakwa karena merawat para pengunjuk rasa dan memberikan rekaman kekerasan kepada stasiun televisi Al-Jazeera terus ditunda.

Protes terhadap pemerintah terus berlangsung setiap malam di desa-desa kaum Syiah, yang diawasi ketat oleh militer dengan membangun pos-pos pemeriksaan untuk mencegah para pengunjuk rasa berkumpul dalam jumlah besar. “Aksi unjuk rasa ini tidak akan berhenti sampai pemerintah direformasi.” Menurut dia, aksi represif masih terjadi setiap hari di pos-pos pemeriksaan polisi. Dia mengatakan penduduk dilecehkan hanya karena dia

Syiah. BCHR yakin konflik di Bahrain bukan isu sektarian melainkan politis.
(<https://dunia.tempo.co/amp/389080/situasi-di-bahrain-makin-buruk>)

Pengunjuk rasa anti-rezim di Bahrain kembali menggelar aksi unjuk rasa pada tahun 2012. Menurut laporan, unjuk rasa tersebut diselenggarakan di wilayah sekitar ibukota Bahrain, Manama. Para demonstran kembali ke jalan dengan slogan-slogan anti-rezim. Mereka terus meneriakkan kalimat seperti, "Kami tak akan pernah menerima penghinaan dan menyerukan kejatuhan rezim," kata laporan itu seperti dilansir Press TV. Mereka telah memblokir jalan utama di ibu kota. Para pengunjuk rasa terus akan melakukan protes hingga hari ini, Juli 2012.

Negara-negara Teluk Persia terus mengalami demonstrasi hampir setiap hari sejak Februari 2011 lalu. Aksi unjuk rasa didominasi seruan pelaksanaan reformasi politik dan pembentukan monarki konstitusional. Namun, perlakuan keras pasukan rezim di Bahrain terhadap pengunjuk rasa, mendorong mereka mengubah tujuan awal. Kini para pendemo meminta rezim keluarga Al-Khalifa mundur dari kekuasaannya. Pada pertengahan Maret 2011 lalu, Arab Saudi mengerahkan pasukan di Bahrain. Pasukan tersebut untuk membantu mengendalikan pengunjuk rasa anti-rezim.
(<https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/07/20/m7fy2g-antirezim-bahrain-kembali-berunjuk-rasa>)

III.4 Politik Kontemporer Bahrain

Pada tahun 2013, F1 melaksanakan perlombaan di Bahrain. Aksi demonstrasi masih berlangsung di Bahrain, pada sesi latihan ajang balap mobil Formula 1 di Bahrain tetap berjalan meskipun para demonstran yang menuntut reformasi bentrok dengan pihak kepolisian setempat Jumat di lokasi yang tak jauh dari lintasan balap. Para pendukung kelompok Koalisi Muda Revolusi 14 Februari mencoba untuk memadati Pearl Square di Manama, tempat utama protes pro-demokrasi pada Februari dan Maret 2011 lalu. Polisi menembakkan gas air mata serta tembakan peringatan guna membubarkan mereka sebelum mencapai lokasi, kata sejumlah saksi mata, namun tidak ada korban dalam insiden itu.

Para pendukung gerakan yang bersenjatakan bom minyak dan batu bentrok di desa Syiah di luar ibu kota dan membakar ban untuk menutup sejumlah. Para demonstran menyuarakan "Balapan itu adalah kriminal, Tidak! Tidak untuk Formula Satu!". Seluruh peristiwa itu berlangsung tak jauh dari sirkuit balapan Sakhir, selatan kota Manama, tempat sesi latihan berjalan. Sementara itu, ribuan pendukung kelompok oposisi yang lebih moderat, Al-Wefaq, menggelar aksi protes damai di jalan raya Budaya, empat kilometer di barat Manama, yang menghubungkan jalan ke desa Syiah. (Republika. 20 April 2013. Diguncang Demo dan Bentrokan, Ini Nasib Ajang F1 Bahrain. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mliwkj>)

Lebih lanjut, pada tahun 2017 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bahrain pada 15 Agustus, diwarnai bentrok antara pasukan pemerintah dan demonstran anti-pemerintah yang turun ke jalan. Aksi unjuk rasa dilakukan sejak 14 Agustus, mereka melakukan demonstrasi di Pulau Sitra dan desa Barbar, Abu Saiba dan Shakhoura pada hari peringatan kemerdekaan negara tersebut dari Inggris. Selama demonstrasi, mereka meneriakkan slogan-slogan dalam hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Namun, pasukan rezim turun tangan dan melepaskan tembakan untuk membubarkan demonstran. Ada laporan tentang luka-luka di antara para pemrotes di Abu Saiba. Bentrokan juga meletus antara pasukan rezim dan demonstran di Ma'ameer setelah pasukan Manama pindah untuk menekan demonstrasi di desa tersebut. (Hari Kemerdekaan Bahrain Diwarnai Bentrok. 15 Agustus 2017. <https://rmol.id/amp/2017/08/15/303169/https-dunia-rmol-id-read-2017-08-15-303169>)

Kemudian pada tahun 2018 diberitakan bahwa pemimpin oposisi Bahrain terancam hukuman seumur hidup, Syeikh Ali Salman, pemimpin gerakan Al-Wefaq. Hukuman tersebut diberikan atas tuduhan menjadi mata-mata Qatar. Bahrain, bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memutuskan semua hubungan dengan Qatar pada 2017. Negara tersebut melarang warga mereka melakukan perjalanan atau komunikasi karena hubungan Doha dengan Iran dan kelompok Islam radikal. Salman saat ini menjalani hukuman empat tahun dalam kasus terpisah yakni "menghasut kebencian" di kerajaan

itu, yang telah menyaksikan sebagian besar protes Syiah terhadap monarki Sunni sejak 2011.

Pada bulan November di tahun yang sama , Salman dan dua anggota Al-Wefaq lainnya dituduh bekerja untuk intelijen Qatar dengan tujuan menggulingkan pemerintah Bahrain. Raja Hamad telah mengumumkan pemilihan parlemen pada 24 November di Bahrain. Anggota partai oposisi yang dibubarkan, termasuk Al-Wefaq dan kelompok Al-Waad sekuler. Gerakan oposisi telah dilarang dan ratusan pengikutnya dipenjarakan. Bahrain tahun lalu meratifikasi amandemen konstitusi yang memberikan pengadilan militer wewenang untuk mengadili warga sipil yang dituduh melakukan terorisme. Bahrain, menuduh Syiah Iran memprovokasi kerusuhan di kerajaan itu, namun Iran membantah. PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik monarki Bahrain atas perlakuannya terhadap para pengunjuk rasa (<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181104155837-120-343899/pemimpin-oposisi-bahrain-terancam-hukuman-seumur-hidup>)

Hingga pada tahun 2019, Bahrain tetap menuduh kelompok Syiah Iran mengobarkan militansi di kerajaan itu, tudingan yang terus dibantah oleh Iran. Karena hal ini, Bahrain dilaporkan mengeksekusi dua aktivis Syiah pada Juli 2019 terkait pembunuhan seorang perwira polisi pada 2017. Kelompok-kelompok HAM mengidentifikasi kedua aktivis Syiah itu Ali al-Arab dan Ahmed al-Malali, yang divonis hukuman mati pada tahun lalu, dalam persidangan massal bersama 56 orang lain. Mereka divonis atas kejahatan

terorisme. Keduanya diduga bagian dari sel teroris yang dilatih untuk menggunakan senjata berat dan bahan peledak. Serangan ini disebut didalangi oleh para pemimpin yang berbasis di Iran. Persidangan massal merupakan hal yang biasa terjadi di Bahrain setelah pemberontakan gagal pada 2011 yang dipimpin oleh anggota oposisi Syiah. Sejumlah orang dipenjara terkait peristiwa itu, termasuk politisi dan aktivis hak asasi manusia. Kelompok aktivis hak asasi manusia yang bermarkas di London, Institut Hak-hak dan Demokrasi Bahrain (BIRD), mengatakan "eksekusi ini menandai salah satu hari paling gelap di Bahrain".

(<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190727180136-120-416069/bahrain-eksekusi-mati-dua-aktivis-syiah>)

BAB IV

POLITIK KONTEMPORER QATAR

IV.1 Sejarah Qatar

QATAR merupakan kerajaan (emirat) di Semenanjung Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia (utara dan timur), Uni Emirat Arab (tenggara), Arab Saudi (barat daya), dan Teluk Bahrcin (barat). Agama yang dianut oleh masyarakat Qatar adalah Islam (92,4%); Kristen (5,9%); Hindu (1,1%); Bahai (0,2%); lain-lain (0,4%). Qatar sudah ditempati penduduk kira-kira 1.000 tahun yang lalu, tetapi pemerintahan yang kuat baru ada pada akhir tahun 1700-an, ketika Wahabi, sebuah sekte Islam dari Arab Saudi, menguasai Qatar. Pada permulaan tahun 1800-an, para sheik dari keluarga al-Thani memimpin suku-suku Qatar, tetapi kemudian Ottoman Turki meluaskan kekuasaannya sampai ke Qatar. Selanjutnya, sejak tahun 1916, Qatar menjadi daerah protektorat Inggris; kedaulatan Qatar diakui, tetapi urusan luar negeri tetap dipegang oleh Inggris. Pada tahun 1971 Qatar menjadi negara merdeka sepenuhnya di bawah Emir Ahmad bin Ali al-Thani, dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berkat minyak, Qatar telah berubah dari sebuah negara miskin di daerah gurun yang gersang menjadi sebuah negara makmur. Penemuan minyak telah mengubah masyarakat, dari masyarakat pencari mutiara, nelayan, dan penggembala menjadi masyarakat sejahtera dengan ekonomi yang lebih beranekaragam. Dan berkat minyak, di Qatar tersedia banyak lapangan kerja yang layak,

terutama sejak tahun 1060-an. Negara ini merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di Teluk Persia. Sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari minyak. Cadangan minyaknya diperkirakan mencapai kira-kira 6 milyar barel.

Dengan menggunakan pendapatan dari minyak, industri-industri lain terus dikembangkan, agar negara tidak hanya tergantung pada minyak. Untuk itu dibangun pabrik pupuk, semen, petrokimia, baja, dan lain-lain. Juga dibangun pembangkit tenaga listrik, fasilitas angkutan yang lebih baik, dan pabrik penyulingan air laut.(<https://www.sejarah-negara.com/808/sejarah-negara-qatar-lengkap/>)

IV.2 Politik Kontemporer Qatar : Embargo Terhadap Qatar

Perseteruan antara Saudi dengan Qatar dapat ditelusuri sejak periode pertengahan abad ke-20. Pada periode tersebut, perseteruan terpusat pada sengketa perbatasan dan sempat melibatkan beberapa negara lain di wilayah Teluk. Konflik-konflik perbatasan tersebut mencapai puncaknya ketika era dekade 1990-an, awal tahun 2014, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain melakukan pembekuan hubungan diplomatik, yang disebabkan karena perbedaan dukungan politik yang dikenal dalam peristiwa *Arab Spring*. Tidak sampai satu tahun, tepatnya pada bulan November 2014, ketiga negara tersebut sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar setelah adanya mediasi yang dilakukan oleh Kuwait (al-Jazeera, 2017).

Normalisasi hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Tahun 2016 beberapa insiden yang membuka tabir atas dukungan Qatar kepada beberapa kelompok yang dipandang oleh Arab Saudi, UEA, dan Bahrain serta Mesir sebagai kelompok teroris, termasuk perubahan afiliasi Hamas dari Riyadh ke Doha. Hubungan diplomatik antara Qatar dengan negara-negara tersebut kembali memburuk. Perseteruan Qatar dan Arab Saudi kembali terjadi pada tahun 2017. Memanasnya hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Qatar secara fundamental disebabkan oleh munculnya rasa kecemburuan serta kecurigaan Arab Saudi terhadap peningkatan kerjasama antara Qatar dan Iran. Sejak tahun 2010 hingga saat ini Qatar dan Iran terus melakukan peningkatan kerjasama bilateral secara masif. Diperparah dengan adanya kerjasama antara Qatar dan Iran dalam pembagian ladang gas terbesar di dunia yaitu North Dome dan South Pars. Arab Saudi tidak pernah menyetujui hubungan baik dibidang apapun dengan Iran, dan hubungan baik Qatar-Iran tersebut telah meningkatkan sentimental dan kecemburuan Arab Saudi.

Kedekatan hubungan Qatar dan Iran, kemudian krisis diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi juga didorong oleh sebab-sebab lain, seperti pelanggaran terhadap Riyadh Agreement. Setelah terjerat Perjanjian Riyadh yang terbentuk sejak tahun 2013 dan diratifikasi oleh Qatar melalui Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada tahun 2014. Namun, Riyadh Agreement tersebut tidak sepenuhnya mengikat Qatar untuk patuh terhadap esensi di dalamnya. Arab Saudi menuduh Qatar melanggar Riyadh Agreement dengan poin: Qatar masih memberikan dukungan kepada kelompok-

kelompok Islam radikal seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas, Al-Qaeda, ISIL, dan afiliasi teroris radikal di Libya. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin juga melanggar poin untuk menjaga stabilitas Mesir, mengingat kelompok tersebut adalah kelompok yang dianggap sebagai destabilisasi keamanan dalam negeri Mesir dan negara-negara koalisi Arab Saudi lainnya. Selain itu, Al-Jazeera juga masih dianggap bias dalam memberitakan peristiwa di Timur Tengah dimana media ini begitu terbuka ketika memberitakan perkembangan yang terjadi di luar Qatar senyata-nyatanya namun berbanding terbalik ketika memberitakan hal-hal tentang Qatar. (Cahyani, S. B ,2019).

Gejolak hubungan semakin memanas antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan Qatar, diawali karena adanya peningkatan eskalasi kerjasama bilateral antara Qatar dengan negara rival Arab Saudi, yaitu Iran dan Turki. Sejak tahun 2010 Qatar dan Iran memang saling memperdalam hubungan bilateral mereka, dengan menandatangani sebuah perjanjian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam memerangi penyelundupan dan obat-obatan terlarang, pemalsuan, dan pencucian uang. Kemudian pada tahun 2014, pada upaya untuk memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi, bersamaan dengan penandatanganan beberapa protokol keamanan, kedua negara mengumumkan pembentukan tiga zona perdagangan bebas-gabungan, satu terletak di kota pelabuhan Bushehr di Iran dan dua lainnya di Qatar, Doha dan pelabuhan Al Ruwais. Pada tahun 2015, perdagangan Qatar-Iran diperkirakan sekitar \$500 juta. Di bidang

energi, Qatar dan Iran saling bekerjasama dalam mengelola sumber daya gas alam di wilayah Teluk Persia. Qatar dan Iran sama-sama memiliki ladang Gas- Kondensat South Pars atau North Dome. Ini adalah ladang gas alam terbesar di dunia, dengan kepemilikan lapangan yang dibagi antara Iran dan Qatar.

Dengan kepemilikan yang dibagi menjadi dua, ladang gas alam tersebut telah memperkuat hubungan Qatar dan Iran. Pada daftar ladang gas alam, ladang gas ini memiliki cadangan yang dapat menghasilkan gas alam lebih banyak daripada gabungan bidang lainnya. North Field dan South Pars yang biasa juga disebut Lapangan Utara di Qatar dan Pars Selatan di Iran berada di antara batas Qatar dan Iran. Ladang gas tersebut mencakup 97.000 km² dengan mayoritas terletak di perairan Qatar (Qotrunnada, 2, 19)

Meningkatnya kerjasama antara Qatar dan Iran telah menyulut amarah dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Aksi boikot terhadap Qatar dilakukan negara koalisi Arab Saudi pada bulan Juni 2017 lalu. Pada Juni tahun 2017, Ketegangan Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir mencapai titik puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah keempat negara itu memutuskan hubungan diplomatik. Dalam sebuah langkah yang dirancang sebagai tekanan pada pemerintahan di Doha, negara-negara tetangga Qatar di Teluk Arab juga menutup perbatasan mereka dengan negara kaya tersebut. Sementara Mesir menutup wilayah udara dan pelabuhan untuk semua bentuk angkutan Qatar.

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan pemerintah Libya yang berbasis di timur, juga memutuskan hubungan mereka dengan Doha. Maladewa kemudian bergabung sebagai -sejauh ini- satu-satunya negara non Arab (kendati mayoritas penduduknya Islam) yang melakukan pengucilan diplomatik itu. Setelah mantan presiden Mesir Mohamed Morsi - pemimpin Ikhwanul Muslimin - digulingkan pada tahun 2013, Qatar menyediakan suatu platform untuk para anggota kelompok yang dilarang oleh pemerintah Mesir itu. Arab Saudi dan UEA juga menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi 'teroris'.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di lembaga pemberitaan Saudi, SPA, Qatar dituduh "mendukung berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah tersebut, termasuk Kelompok Ikhwanul Muslimin, Daesh (ISIS) dan Al-Qaida." Namun, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan, langkah pemutusan hubungan oleh Riyadh, Abu Dhabi dan Manama itu "tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada tuduhan yang tak terbukti dan tak berdasar." Pernyataan tersebut menekankan bahwa Qatar 'berkomitmen' pada Piagam Dewan Kerjasama Teluk dan "menjalankan tugasnya dalam memerangi terorisme dan ekstremisme". Orang kuat di militer Libya, Khalifa Haftar, yang didukung Mesir dan UEA, menuduh Qatar mendukung 'kelompok-kelompok teroris'.
(Empat Faktor Kejengkelan Tetangga Arab.
<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036.amp>)

Karena blockade tersebut pada tahun yang sama Iran telah mengirim lima pesawat kargo penuh bermuatan bahan pangan ke Qatar yang menderita kelangkaan pasokan akibat blokade kawasan. Juru bicara maskapai menerbangkan Iran Air, Shahrokh Noushabadi, mengatakan kepada kantor berita Agence France Presse (AFP), bahwa ‘Sejauh ini lima pesawat yang membawa bahan-bahan pangan yang mudah busuk, seperti buah dan sayuran telah dikirim ke Qatar dan masing-masing pesawat membawa sekitar 90 ton kargo’ (Iran Kirim Lima Pesawat Bermuatan Makanan. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40240145.amp>)

Sejumlah negara, dipimpin Arab Saudi, seteru utama Iran, pekan lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, diikuti Yaman, Maladewa, dan Lybia, menuduh Qatar mendanai terorisme dan ekstremisme. Menyusul pengucilan itu, Arab Saudi menutup perbatasannya dengan Qatar, jalur yang menjadi sumber 40% pasokan pangan Qatar. Sebagai gantinya, Iran telah membuka wilayah udaranya untuk penerbangan pesawat-pesawat Qatar, menyusul penutupan wilayah udara Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab bagi pesawat-pesawat Qatar. (Iran Kirim Lima Pesawat Bermuatan Makanan. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40240145.amp>)

Kemudian, pada tahun 2018 Qatar mengatakan penyebab utama blokade negara-negara Teluk adalah serangan siber terhadap kantor berita nasional yang berdampak dengan penerbitan artikel yang seolah-olah mengutip

penguasa Qatar. Penguasa Qatar digambarkan bersimpati dengan kelompok militan Lebanon Hizbullah dan kelompok Hamas di Gaza. Shihabi, pendiri lembaga Arabia Foundation di Washington, AS. mengatakan Qatar melanggar perjanjian dengan terus memberi dukungan finansial kepada para pembangkang di Timur Tengah dan juga mendukung Al Jazeera. Pada pertengahan tahun 2018 Qatar membuka pelabuhan baru senilai US\$7 miliar atau sekitar Rp97 triliun lebih cepat dari rencana. Pelabuhan di Teluk ini sangat efektif mengatasi sanksi ekonomi yang diterapkan negara-negara tetangga. Pelabuhan antara lain dimanfaatkan sebagai pintu masuk barang dan material untuk pembangunan stadion dan berbagai fasilitas penunjang pelaksanaan Piala Dunia 2022 di negara tersebut. Isolasi yang dilakukan negara-negara Teluk mendorong Qatar untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Iran. Qatar memiliki batas maritim dengan Iran dan sekarang menggantungkan pada wilayah udara Iran. (Setahun Diboikot oleh Negara-negara Teluk, Qatar 'Tidak Juga Tumbang'. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-44372341.amp>)

IV.3 Qatar dan OPEC

Peristiwa paling terakhir yang terjadi di Qatar adalah berakhirnya keanggotaan Qatar di dalam OPEC dan telah mendapatkan pengakuan resmi dari OPEC. Berdasarkan pernyataan Menteri Energi negara Qatar, Saad Sherida al-Kaabi, tanggal 1 Januari 2019 Qatar memilih untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di dalam OPEC. Pemerintah Qatar menyatakan

bahwa penyebab mengundurkan diri dari OPEC merupakan hasil rumusan kebijakan strategis Qatar terkait masa depan keamanan energi. Mencapai strategi pertumbuhan ambisius kami tidak diragukan lagi akan membutuhkan upaya, komitmen, dan dedikasi yang berfokus untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Qatar sebagai produsen gas alam terkemuka (Bergman, J. (2018) Maka, Pemerintah Qatar berkeinginan untuk fokus dalam mengembangkan potensi LNG (*Liquefied Natural Gas*) domestik dan juga menjadikan Qatar sebagai pemasok LNG utama dunia. Keputusan penarikan diri Qatar, mencerminkan keinginannya dalam memfokuskan upaya perencanaan mengembangkan dan meningkatkan produksi gas alamnya dari 77 juta ton per tahun menjadi 110 juta ton di tahun-tahun mendatang. (Sabga, P. (2018)

Qatar menjadi negara Arab pertama yang memutuskan untuk keluar Dilansir dari situs resmi US-Qatar Business Council, ekonomi Qatar didasarkan pada produksi dan ekspor gas alam, minyak bumi dan produk-produk yang berasal dari minyak dan gas, setengah dari pendapatan pemerintah berasal dari komoditas ini dan terdiri dari sekitar 90% dari ekspor. Minyak dan gas telah menjadikan Qatar sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi kedua di dunia pada tahun 2009 yakni sebesar 76.000 USD. Qatar sempat mengalami penurunan Pertumbuhan PDB menjadi 3,6 persen pada 2015, hal itu dikarenakan penurunan produksi di sektor minyak dan gas, dan melambatnya pertumbuhan di sektor non-minyak (US – Qatar Business Council, n.d). 1998 hingga 2018 produksi LNG dalam negeri Qatar

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berawal dari nilai produksi sebesar 19.6 billion cubic meters (BCM) hingga pada tahun 2018 berada pada angka 175.5 bcm (Wang, T. ,2019).

Produksi minyak bumi Qatar terhitung mampu menghasilkan 600.000 barel/hari, sekitar 2% dari hasil produksi OPEC. Dari jumlah tersebut, Qatar mendapatkan keuntungan dari hasil ekspor melalui OPEC. Berdasarkan pendapatan ekspor minyak bersih OPEC, pada tahun 2016 Qatar mendapatkan \$25 Billion dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 yakni sebesar \$35 Billion. Namun, sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi \$22 Billion. Penurunan tersebut dialami oleh seluruh anggota OPEC pada saat itu dan tidak hanya dialami oleh Qatar. Qatar menjadi negara dengan peringkat ke-6 dengan total pendapatan terbesar OPEC dibandingkan dengan 8 negara lainnya (IEA, 2018). Berdasarkan data dari IEA, Qatar memiliki cadangan terbesar ke-9 di OPEC dan terbesar ke-13 di dunia. Minyak mentah Qatar dan kontrak produksi kondensat menempati urutan ke 17 di dunia, sebagian besar produksi negara dikirim ke luar negeri/ekspor. Minyak telah menyumbang sekitar 40% dari produk domestik bruto (PDB) dan sekitar 63% dari pendapatan pemerintah Qatar.

Dilansir dari situs resmi The Oil and Gas Year, Qatar memiliki cadangan gas 24,5 triliun cubic meter (865 tcf), sebagian besar terletak di Lapangan Utara lepas pantai. Menurut Bank Nasional Qatar, cadangan yang tersedia memungkinkan Qatar mempertahankan produksinya saat ini selama 138 tahun. Masa cemerlang dari produksi gas Qatar tepatnya diawali sejak

pada tahun 2000-an. Dengan kepemilikan cadangan gas yang terbilang sangat besar serta nilai produksi yang cukup tinggi, Qatar memasukkan energi LNG sebagai salah satu komoditas ekspor. Qatar adalah pengeksport gas alam terbesar kedua di dunia, mengeksport hampir 4,3 Tcf pada tahun 2014. Qatar kembali menjadi pengeksport LNG terbesar di dunia, seperti yang telah terjadi pada 2006, yaitu menjadi penyumbang 32% dari ekspor gas alam global. Tujuan ekspor LNG Qatar pada tahun 2014 diantaranya mencakup wilayah Eropa (72%), Asia (23%), dan wilayah lain (5%) (IEA, 2015). Qatar memiliki dua sumber daya energi yang potensial jika dilihat dari sisi produksi hingga pendapatannya, diantaranya minyak bumi dan LNG (Qotrunnada, 2019)

Keputusan Qatar meninggalkan OPEC merupakan keputusan yang menggambarkan bahwa terjadi keretakan di dalam negara-negara eksportir minyak khususnya di wilayah Timur Tengah. Hingga memunculkan ketidakharmonisan sikap serta interaksi hubungan antara Qatar dengan negara lainnya di dalam keanggotaan OPEC. Interaksi antara Qatar dengan pihak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi salah satu faktor kunci terkait alasan Qatar untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Negara-negara anggota selalu terpecah karena konflik politik dan regional di Timur Tengah, yang telah mempengaruhi eksistensi OPEC . (Ahmad, P. 2016)

BAB V: FUNDAMENTALISME DAN TERORISME DI TIMUR TENGAH

V.1 Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme muncul pertama kali sebagai upaya untuk memahami gejala perkembangan di lingkungan Kristen Protestan dan Katolik. Fundamentalisme lahir dalam situasi konflik antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan dalam sejarah Amerika Serikat pada saat Perang Dunia I. Pemimpin yang populer pada waktu itu adalah seorang tokoh agraris, W.J. Bryan. Konflik tersebut muncul bersamaan dengan situasi depresi nilai-nilai agraris dalam proses industrialisasi dan urbanisasi di negeri itu. Istilah fundamentalisme ini kemudian dipopulerkan oleh kaum Protestan Amerika sebagai perlawanan terhadap kaum liberal yang menurut mereka telah merusak keimanan orang-orang Kristen (Armstrong , 2003) Di lingkungan Islam Arab, fundamentalisme muncul setelah adanya kekalahan militer Arab di tangan bangsa Israel pada perang Juni 1976. Menurut Bassam Tibi, kekalahan itu mengantar dunia Arab dalam kubangan konflik yang berkepanjangan dan memunculkan kelompok fundamentalis di kalangan mereka ((Tibi, 2000), Sedangkan fundamentalisme Yahudi muncul akibat mereka terlalu kaku dalam memahami doktrin agama mereka. Bahkan fundamentalisme agama tidak hanya terdapat pada agama monoteisme saja. Ada juga fundamentalis Budha, Hindu dan bahkan Kong Hu Cu, yang sama-sama menolak butir-butir nilai budaya liberal, saling berperang atas nama

agama (Tuhan), dan berusaha membawa hal-hal yang sakral ke dalam urusan politik dan negara (Armstrong, 2001)

Menurut Karen Armstrong munculnya gejala fundamentalisme dalam agama bukanlah sesuatu yang muncul secara mendadak. Kelahirannya disebabkan oleh berbagai macam latar belakang sosial budaya yang melingkupi agama yang bersangkutan (Armstrong 2001). Menurut Taylor, kaum fundamentalis adalah kelompok orang yang melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan refomasi keagamaan, bercorak literalis, dan penekanan pada pemurnian doktrin. (Taylor, 1988) Sedangkan menurut Bannerman, kaum fundamentalis adalah kelompok ortodoks yang bercorak rigit dan *ta'ashub* (fanatik), yang bercita-cita untuk menegakkan konsep-konsep keagamaan zaman klasik dari abad ketujuh Masehi. (Bannerman, 1988). Bassam Tibbi menambahkan bahwa fundamentalisme lebih tegas, yaitu aliran keagamaan yang menolak segala hal yang baru, selain apa yang ada dalam doktrin (Tibi, 1993)

Leonard Binder mengelaborasi beberapa ciri dari fundamentalisme, ia menyebutkan bahwa ciri utama fundamentalisme adalah pandangan yang khas mengenai ijtihad. Menurut kaum fundamentalis, ijtihad sangat terbatas dalam hal-hal yang tidak dibahas oleh syari'ah. Sedangkan ijtihad yang diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam hanya ijtihad pada zaman sahabat Nabi, dan tidak boleh dihapuskan oleh ijtihad generasi sesudahnya (Binder, 1961) . Fazlur Rahman menambahkan beberapa ciri lain fundamentalisme, yaitu *elan vital* yaitu semangat Anti Barat. Menurut Rahman, kaum

fundamentalis senang dengan slogan-slogan yang bercorak distinktif, namun mereka pada hakikatnya merupakan kelompok yang anti intelektual. Karena pemikiran mereka tidak berakar dari al-Qur'an dan budaya intelektual tradisi Islam. Semangat anti Barat yang didengungkan oleh kaum fundamentalis terlihat bagaimana pandangan mereka dalam menyikapi modernisme dan semua produk Barat, semua ditolak oleh mereka (Rahman , 1979).

V. 2 Fundamentalisme dan Terorisme Kontemporer Di Timur Tengah

Kaum fundamentalis berusaha menolak eksistensi negara-bangsa, berdasarkan perbedaan geografis, bahasa, warna kulit dan budaya. Mereka juga menolak gagasan tentang pluralisme dan semua budaya yang berasal dari Barat. Sehingga, gerakan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis sebenarnya memiliki beberapa karakter, yaitu: *pertama*, perlawanan terhadap semua bentuk dominasi yang dilakukan oleh Barat. *Kedua*, fundamentalisme agama mempunyai agenda politisasi agama yang agresif dalam semua lini kehidupan. *Ketiga*, fundamentalisme dan radikalisme, baik dalam tradisi keagamaan Kristen, Islam, Yahudi maupun agama lain, merupakan bentuk superfisial dari terorisme agama(Tibi, 2000). Mereka mengembangkan jaringan, melakukan rekrutmen dan kaderisasi selama beberapa dekade, dengan menghimpun dana, merekrut anggota baru, melatih milisi, mendoktrin dan menyebarkan ajaran mereka dengan misi untuk melawan Barat dan kekuatan sekuler. Kebangkitan kaum fundamentalis dimulai sejak lengsernya Shah Iran Reza Pahlevi, yang kemudian ditandai dengan tampilnya Imam

Khoemaini sebagai pemimpin Revolusi Iran tahun 1979. (Sahasrad & Al Chaedar, 2017)

Secara ideologi, kaum fundamentalis dan kaum radikal memiliki kesamaan dalam beberapa hal, di antaranya; pertama, mereka meniscayakan hubungan yang harmonis antara agama dan negara (Al Jabiri, 1996), terutama terbentuknya lembaga dan institusi yang berlabelkan pada Islam. Seperti isu formalisasi syariat Islam, negara Islam, memperlakukan gender dan simbol-simbol ideologi keagamaan lainnya. Kedua, sikap kaum fundamentalis dan kaum radikal sangat stigmatis terhadap Barat. Dalam image mereka, Barat tampil sebagai monster imperialis yang sewaktu-waktu mengancam akidah dan eksistensi mereka. Dialog Islam dan Barat selalu mengalami kebuntuan. Arah politik luar negeri kaum radikal sengaja diarahkan sebagai pemberontakan dan menggugat dominasi Barat (Giddens, 1987). Ketiga, deklarasi perang terhadap paham sekuler. Kaum fundamentalis dan kaum radikal berjuang keras untuk memerangi dan meruntuhkan tatanan yang sekuler tentang lembaga politik dan bermaksud menggantikannya dengan tatanan Tuhan.

Sedangkan dalam gerakan, fundamentalisme dan radikalisme akan berbenturan dengan demokrasi, egaliter, gender, HAM dan isu lainnya. Sayyid Quthb misalnya, ia sangat keras menentang setiap gagasan mengenai kedaulatan rakyat. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan kekuasaan Tuhan yang menguasai manusia dalam setiap bentuk, sistem dan kondisi. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Fadlallah Nuri. Menurutnya, inti dari gagasan

demokrasi, yakni kesamaan dan kedudukan semua warga negara, sangat mustahil diterapkan di negara muslim. Penolakan kaum radikalisme terhadap kedaulatan rakyat dan negara-bangsa, bukan hanya karena ia merupakan solusi yang diimpor (*al-hulûl al-Mustauradah*) (Al Qardawi , 1980.) fundamentalisme dan radikalisme menjadi tantangan besar bagi negara-bangsa, yang mempunyai misi membentuk *nation-building* yang inklusif. Karena mereka akan menggunakan kekerasan dalam upaya untuk merealisasikan agenda mereka, seperti penembakan brutal kelompok ekstrim dan fundamentalis Yahudi terhadap ratusan warga Muslim Palestina yang sedang melakukan shalat subuh di Masjid al-Khalil (Hebron), yang menewaskan 63 orang, serangan kamikaze terhadap Gedung WTC dan Pentagon yang mengejutkan dunia dan peristiwa lain yang terekam dalam aksi mereka (Kasdi , 2002)

Ketika kita berbicara mengenai paham radikalisme, maka secara tidak langsung kita juga membahas mengenai pandangan terhadap terorisme. Dalam buku *Terror in the Mind of God*, Mark Juergensmeyer menyatakan akar kata terorisme diderivasi dari bahasa Latin, yaitu *terrere*, yang mengandung arti 'mencipta ketakutan'. Secara umum, istilah ini dipakai jamak dalam seni politik, sebagai suatu ancaman atas keteraturan sosial, selama 'kuasa teror' (the Reign of Terror) di masa Revolusi Perancis pada pungkasan abad ke delapan belas (Jurgemsmeier, 2002). Karenanya, terorisme sering diartikan sebagai penggunaan teror yang sistematis khususnya sebagai suatu sarana memperoleh tujuan-tujuan politik.(Webster, 1995). Sementara

menurut CIA Amerika Serikat (Centre Intelligence Agency) terorisme dilaksanakan dengan dukungan satu organisasi atau pemerintah asing dan atau diarahkan melawan pemerintah, institusi dan orang asing. Dalam buku *Inside Terrorism*, Hoffman mengartikan terorisme sebagai penciptaan dan eksploitasi ketakutan yang dilakukan dengan sengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka mencapai perubahan politik (<http://www.christianitytoday.com/ct/2001/138>)

Terorisme bekerja dalam tiga cara: Pertama, dengan cara meniadakan hubungan antara obyek yang menjadi sasaran kekerasan (*target of violence*) dengan alasan di balik kekerasan tersebut (*reason of violence*). Karena itu, terorisme acap dianggap sebagai sebuah metode perang dengan sengaja menyerang mereka yang seharusnya tidak diserang. Akibatnya, reaksi kemarahan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari kekerasan lainnya. Kedua, karena terorisme bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, ia 'menjarah' rasa kepastian yang seharusnya dimiliki masyarakat untuk menjalankan kehidupannya secara normal. Dalam hal ini, terorisme menghancurkan rasa kepastian yang dijamin oleh berfungsinya negara secara normal, yang fungsi minimumnya adalah perlindungan atas kehidupan warga negaranya. Ketiga, karena ketidaknormalan yang terjadi, terorisme mengubah masyarakat yang menangi korban dari aksi terorisme menjadi masyarakat yang kemudian menggunakan kekerasan juga sebagai aksi pembalasan. Hal ini paling tidak terlihat dalam serangan militer Amerika Serikat ke Afghanistan yang terjadi tanpa protes signifikan dari warga Negara Amerika Serikat sendiri

(Vermonte,2003) Dengan demikian, karakter umum dari terorisme adalah mengabsahkan kekerasan, atau melibatkan ancaman kekerasan, untuk mencapai tujuan. Menurut Walter Lacquer, terorisme selalu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. (Laquer , 1999) . Sedangkan Mark Jurgensmeyer menegaskan ada dua ciri utama terorisme kontemporer yaitu; ada kekerasan, dan bermotif agama (Laquer, 1999)

Di antara tradisi agama besar dunia, Islam yang paling disalah pahami oleh Barat. Banyak label negatif sering dilontarkan Barat terhadap Islam. Menurut Reuven Firestone, sejak Islam berhasil menaklukkan Andalusia (Spanyol) di awal abad kedelapan, dan juga Turki Utsmani yang sukses menyerang kota Wina tahun 1683, Islam dipandang mengancam eksistensi kerajaan Kristen. (Firestone, 1999). Menurut Bruce B. Lawrence, pandangan negatif mengenai Islam disebabkan dominannya pemikiran pandangan mengenai Islam yang mendefinisikan bahwa Islam berasal dari satu "Arab" Timur Tengah yang penuh permusuhan. (Lawrence, 1998) Bahkan, Max Weber, proponen akademisi studi sosiologi, menyatakan Islam adalah suatu agama perang (*a warrior religion*) (Schroeder,1992)

Menurut Azyumardi Azra, ekses negatif yang ditimbulkan Barat di dunia Muslim pada abad ke-19 telah menginspirasi kemunculan kaum fundamentalis Muslim, yang menjustifikasi aksi teror dengan agama. Selain itu, mereka mengaku merepresentasikan *the pristine Islam* dibanding kelompok Islam di luar mereka. Pada akhirnya, gerakan ini tidak ragu-ragu melaksanakan gerakan mati syahid (*martyrdom*) sebagai strategi melawan

Barat (Azra,2003).Para fundamentalis berjuang melawan negara sekuler melalui bom-bom bunuh diri (*suicide bombers*). Kekerasan telah menjadi penanda perjumpaan Muslim modern dan Barat (Lawrence 1998). Dalam beberapa kasus teror, agama bertugas tidak saja menyediakan ideologi, tetapi juga motivasi dan menjadi struktur organisasi bagi para pelakunya. (Jurgenmeyer,1998)

Kaum fundamentalis disebut juga sebagai “kaum fanatik modern”, karena salah satu cirinya adalah “tidak adanya toleransi”. Fatwa Ayatullah Khomeini bulan Februari 1989, terhadap Salman Rushdie, karena menulis novel *The Satanic Verses* (1986), munculnya gerakan Ikhwan al-Muslimun, yang anggotanya menghancurkan gedung bioskop dan restoran yang umumnya ramai dikunjungi orang asing, merazia wanita yang tidak mengenakan jilbab; terbunuhnya Anwar Sadat oleh seorang militan Muslim (1981), karena dianggap memihak kepentingan Israel dan Amerika Serikat, adalah di antara berbagai contoh “gerakan fundamentalisme” Islam (Bruce, 2002)

Fundamentalisme agama menolak pandangan umum modern yang melihat arti agama, sebagai iman yang bersifat toleran dan luwes, tidak eksklusif dan tidak banyak menuntut; iman bagi orang modern adalah sesuatu yang cukup harmonis dengan iman iman yang lain, atau yang imannya kurang. Penolakan keras terhadap pandangan keagamaan modern inilah yang menjadi model sekaligus modal bagi kaum fundamentalisme dalam melakukan pergerakan (Gellner, 1994) Pergerakan kaum fundamentalisme

ini yang selalu dikaitkan dengan “terorisme”. Dalam kaitannya dengan peristiwa teror runtuhnya gedung *World Trade Centre* (WTC), 11 September 2001, Giovanni Borradori mewawancarai dua orang filosof besar di zaman kontemporer ini, satu di antaranya adalah Jürgen Habermas. Menurut Habermas, ketika gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama berjuang untuk membangun kembali “teokrasi”, itu sebuah fundamentalisme. Manakala fundamentalisme ini berhadapan dengan pengetahuan ilmiah dan pluralisme keagamaan, maka sikap eksklusifisme tumbuh dan berkembang, lalu dengan dibumbui motif-motif politis, jadilah ia “perang suci”, “perang syahid”, “jihad” dan lain sebagainya.⁶³ Berperang dengan “tanpa musuh yang jelas” inilah yang disebut “terorisme”. (Baradori, 2005)

Menurut Habermas ketika orang tidak tahu siapa musuhnya, seberapa besar kemungkinan bahaya yang akan menimpanya, saat itu terorisme sudah berhasil menjustifikasi dirinya. Osama bin Laden, dalam kasus WTC bukanlah musuh nyata, ia lebih mungkin berfungsi sebagai seorang pemeran pengganti. Terorisme yang untuk sementara waktu diasosiasikan dengan nama “Al-Qaeda” membuat tidak mungkin pengidentifikasian lawan dan setiap penilaian yang realistis atas bahayanya. Hal yang tidak teraba inilah yang memberikan suatu kualitas baru kepada terorisme (Baradori, 2005)

V. 3 Terorisme Al Qaeda

Pergerakan Al-Qaeda menjadi sorotan dunia sejak kelompok ekstrimis Islam ini mengakui bahwa serangan di simbol penting kehidupan Bangsa

Amerika yaitu WTC dan Pentagon merupakan aksi terror yang dilakukan oleh kelompoknya. Pergerakan Al-Qaeda tidak hanya mempengaruhi pergerakan terorisme yang lain (khususnya grup Islamis yang melakukan jihad), tetapi juga mempengaruhi keamanan manusia dan negara bahkan memberikan pengaruh kepada dunia (Rodger, 2003). Al-Qaeda merupakan organisasi Muslim sunni yang radikal, dibentuk oleh Osama Bin Laden sekitar tahun 1988. Sumber keuangan Al-Qaeda sendiri didukung penuh oleh Osama Bin Laden, dimana ia merupakan milioner Timur Tengah yang memiliki banyak aset di luar negeri. Memiliki anggota sekitar 50.000 orang yang tersebar diseluruh dunia, Al-Qaeda memiliki jaringan di 65 negara di seluruh dunia yang beroperasi secara aktif (START). Ada beberapa alasan mengapa Osama Bin Laden dan Al-Qaeda sangat menentang AS. Yang pertama, AS dianggap sebagai “kafir” yang pemerintahannya tidak sesuai dengan peraturan Islam Radikal, yang kedua karena AS mendukung negara-negara “kafir” di Timur Tengah seperti Israel, Mesir, dan Arab Saudi, dan yang ketiga karena keterlibatan AS pada Perang Teluk yang terjadi tahun 1991 (PBS). Sebagai bentuk penentangan terhadap pemerintahan AS, Osama Bin Laden mendeklarasikan “Jihad” atau “Perang Suci” dalam melawan AS. (Payani, 2016)

Serangan 9/11 terhadap AS yang dilakukan Al-Qaeda merupakan klaim sebagai Jihad yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam melawan negara “kafir”. Semenjak kejadian 9/11, Al-Qaeda dianggap sebagai sebuah organisasi relijius transnasional yang memiliki pengaruh penting dalam

Hubungan Internasional, khususnya dalam isu keamanan yang mampu mempengaruhi baik negara besar maupun negara lainnya di dunia dalam pengaturan tatanan dunia (Haynes, 2009) Al-Qaeda tidak hanya menyerang dan memberikan ancaman terhadap AS, tetapi juga pada seluruh dunia. Al-Qaeda banyak melakukan aksi terror di Timur Tengah, Pakistan, India, Eropa, bahkan beberapa sayap Al-Qaeda yang berkembang di Asia tenggara juga melakukan aksi terror (Bom Bali I dan II, Bom di Hotel JW Marriot, dan lain-lain) (Payani, 2016).

Sebagai akibat dalam aksi terror yang mengatasnamakan Jihad, kelompok Muslim radikal menjadi musuh dunia yang harus dihentikan. Dalam kebijakan nasional, hampir semua negara di dunia serentak melakukan internalisasi kebijakan WOT (*Global War on Terror*) dalam kebijakan domestik. Perancis, Jerman, dan Inggris, sekitar tahun 2010an, memberlakukan larangan penggunaan Hijab dan atribut “ke-Islaman” di negara-negara tersebut, terkait dengan adanya ancaman terror bom yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan kelompok Islam ekstrimis lainnya. Pengejaran yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden, membuahkan hasil tahun 2011. Sesuai yang diberitakan dalam CNN edisi 3 Mei 2011, sehari setelah presiden Obama mengumumkan secara resmi kematian Bin Laden, dunia langsung memberikan respon terhadap masalah ini. AS dan sekutunya menganggap ini sebagai pencapaian yang penting dalam penghentian aksi terorisme yang telah mengancam dunia (Payani, 2016).

Al-Qaeda memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai negara, lebih tepatnya di 85 negara. Adapun nama-nama dari Afiliansi Langsung Al-Qaeda di berbagai negara dengan nama-nama berikut;

- Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)
- Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS)
- Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)
- al-Shabaab
- Hayat Tahrir al-Sham (Syrian)
- Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM)
- Al-Qaeda in Bosnia and Herzegovina^[54]
- Al-Qaeda in Caucasus and Russia
- Al-Qaeda in Gaza
- Al-Qaeda in Kurdistan^[55]
- Al-Qaeda in Lebanon
- Al-Qaeda in Spain
- Al-Qaeda in the Malay Archipelago
- Al-Qaeda in the Sinai Peninsula

Al-Qaeda diketahui sudah berdiri sejak tahun 1988, berikut adalah nama-nama dari afiliasi lama mereka:

- Abu Sayyaf – Baiat Ke IS
- Al-Mourabitoun : Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM implementasi Shriah Islam Mali, Algeria, southwestern Libya, dan Niger
- Al-Qaeda in Iraq Menjadi ISI , dan pecah dengan Al Qaeda menjadi ISIS
- Al-Qaeda in the Lands Beyond the Sahel tidak aktif sejak 2015
- Ansar al-Islam bergabung dengan ISIS.
- Ansar Dine

- Islamic Jihad of Yemen (menjadi AQAP)
- Jund al-Aqsa (bergabung dengan Al Murabitun)
- Movement for Oneness and Jihad in West Africa

Selain afiliasi-afiliasi tersebut diatas terdapat pula Afiliasi Tidak Langsung, yaitu:

- Caucasus Emirate faksi
- Fatah al-Islam
- Islamic Jihad Union
- Islamic Movement of Uzbekistan
- Jaish-e-Mohammed
- Jemaah Islamiyah
- Lashkar-e-Taiba
- Moroccan Islamic Combatant Group

V. 4 ISIS

Sejarah pembentukan ISIS dimulai tahun 2004 di Irak saat Amerika menginvasi Irak dan perlawanan awal terjadi di wilayah Barat dimana wilayah ini merupakan wilayah Sunni yang kemudian menyebar ke wilayah timur Suriah (Mair Amit, 2014) . Perkembangan yang cukup pesat ini terjadi akibat kekosongan kekuasaan di Irak paska berakhirnya Rezim Saddam Hussein. Selain itu, meningkatnya jumlah masyarakat Sunni yang terasing dalam bidang sosial dan politik serta ditariknya pasukan AS pada tahun 2001 membuat ISI (*Islamic State of Iraq*) memiliki pengaruh yang semakin kuat.(Payani, 2016)

Meskipun telah terbukti bahwa ISIS adalah cabang dari Al-Qaeda, banyak ahli menyebutkan bahwa ISIS tidak sama dengan Al-Qaeda. ISIS bukan hasil atau bagian dari organisasi jihad yang lama dan bukan juga

evolusi gerakan jihad (Cronin , 2015).ISIS merepresentasi ancaman jihad paska Al- Qaeda yang vakum akibat terbunuhnya Osama Bin Laden. Presiden AS, Barack Obama, menyatakan bahwa ISIS sepenuhnya merupakan organisasi teroris, namun banyak pihak yang menyangkal. Meskipun ISIS menggunakan taktik terorisme, namun organisasi teroris tidak menguasai wilayah tertentu, hanya beranggotakan sedikit anggota, menyerang sipil, dan tidak secara langsung melakukan konfrontasi dengan militer. Disisi lain, ISIS memiliki puluhan ribu pasukan, menguasai wilayah di Irak dan Suriah, meningkatkan kekuatan militer, mengontrol jalur komunikasi khususnya media sosial, menuntut pembangunan infrastruktur, *self-funding*, dan melakukan banyak operasi militer. Inilah alasan mengapa ISIS disebut sebagai *pseudostate*, sebagian besar perilaku ISIS mencerminkan bagaimana negara bekerja. (Cronin, 2015)

Tahun 2014 Kebijakan luar negeri AS bertujuan untuk menciptakan negara Irak yang demokratis yang mampu melawan terorisme dan mampu menyediakan kemampuan administratif yang kuat .(Mair Amit, Kebalikannya, Irak justru menjadi “sarang” terorisme yang paling ditakuti. Penambahan jumlah pasukan ISIS di Irak maupun di Suriah baik yang berasal dari Timur Tengah maupun luar Timur Tengah terjadi dengan sangat cepat. Awalnya AS hanya melihat pergerakan ISIS sebagai bentuk dari pemberontakan akibat rezim pemerintahan yang mengalami disintegrasi. Tahun 2015 ISIS memulai gelombang penguasaan wilayah di Irak dan Suriah, khususnya di Kota Mosul di Irak yang merupakan pusat keuangan dimana

kota ini mengatur regulasi pajak (Doyle , 2016) . ISIS mulai menarik perhatian dunia saat ISIS mulai menggunakan media sosial seperti *Twitter* untuk melakukan perekrutan anggota baru di seluruh dunia. Selain itu, ISIS juga menyebarkan video dan berita mengenai kekejaman mereka terhadap tawanan mereka. Namun sejak Rusia bergabung dengan pemerintahan Assad di Suriah untuk memerangi pemberontak dan pejuang ISIS, ISIS mengalami kemunduran. Beberapa ahli keamanan internasional menganggap bahwa ISIS berperang pada peperangan yang akan dimenangkan oleh oposisi ISIS.

V.5 Misi, Gerakan dan Metode Perekrutan

Rentetan kejadian yang dilakukan oleh ISIS sebagai kelompok terorisme adalah sebagai berikut; ISIS pertama kali muncul di Irak tahun 2004, tepatnya setelah invasi AS ke Irak pada era Sadam Hussein. Pertama kalinya, ISIS yang merupakan pecahan Al-Qaeda ini menggunakan nama Al-Qaeda in Irak atau AQI. Tahun 2011, ISIS memperluas wilayah ke Suriah yang sedang dilanda konflik antara pemberontak melawan rezim Presiden Bashar al-Assad. Tahun 2004: Militan Irak kelahiran Yordania, Abu Musab al-Zarqawi, mendirikan Al-Qaeda in Irak (AQI), cabang Al-Qaeda di Irak. AQI banyak melancarkan serangan teror terhadap komunitas Syiah yang mayoritas di Irak, dengan harapan memicu perang sektarian. Zarqawi pindah ke Irak setahun sebelumnya, bersama ribuan militan lainnya untuk melawan tentara AS dan Inggris yang menginvasi negara tersebut. Juni - Oktober 2006: Zarqawi terbunuh dalam serangan udara AS di Irak pada 7 Juni 2006. Abu Ayyub al-Masri menjadi pemimpin baru AQI. Masri kemudian

mengumumkan pembentukan Islamic State of Iraq (ISI) dan menunjuk Abu Omar al-Baghdadi sebagai pemimpin barunya. April 2010: Abu Omar al-Baghdadi dan Masri tewas dalam operasi gabungan AS-Irak. Abu Bakr al-Baghdadi pun menjadi pemimpin baru ISI (Christiastut, 2019)

Tahun 2011: Baghdadi mengirimkan anak buahnya ke Suriah saat konflik Suriah pecah. April 2013: Baghdadi mengumumkan bahwa kelompoknya untuk selanjutnya akan dikenal sebagai Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) atau dikenal juga sebagai Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Perubahan nama ini diumumkan setelah pecahan Al-Qaeda di Suriah, Jabhat al-Nusra atau Nusra Front, ikut bergabung. Tahun 2014: ISIS mengambil alih wilayah Raqqa di Suriah dan menetapkannya sebagai ibu kota kekhalifahan di Suriah. ISIS juga menguasai kota Fallujah di Irak. Al-Qaeda kemudian memutuskan hubungan dengan ISIS setelah terjadi pertempuran antara militan ISIS dan Nusra Front. ISIS juga berhasil menguasai Mosul dan Tikrit di Irak pada Juni 2014, menjadikan kelompok radikal itu membanjiri perbatasan Irak-Suriah. Di Masjid Agung Al-Nuri di Mosul, Baghdadi mengumumkan perubahan nama ISIS menjadi Islamic State (IS) atau Daulah Islamiyah dan menetapkan kekhalifahannya (Christiastuti, 2019)

Teror mengerikan ISIS pun dimulai. Di Irak, ISIS membantai ribuan warga Yazidi di Gunung Sinjar dan memaksa lebih dari 7 ribu wanita menjadi budak seks mereka. Di Suriah, ISIS membantai ratusan anggota suku Sheitaat. ISIS juga memenggal sandera-sandera asing dari negara-negara Barat yang direkam dalam video propaganda mengerikan. Terdapat jurnalis AS James

Foley dan pekerja LSM Inggris David Haines di antara sandera asing yang dipenggal ISIS

Sedangkan untuk metode perekrutan, anggota kelompok militant Islamic State in Iraq and al-Syam (ISIS) cenderung lebih sulit dideteksi ketimbang anggota Al-Qaeda. Dalam menyebarkan ideology radikalismenya, ISIS menggunakan jaringan internet khususnya melalui media sosial. Sementara Al-Qaeda merekrut anggota dan melatihnya melalui pembaitan seperti melalui Jemaah Islamiah dengan sistem verifikasi yang ketat. ISIS biasanya menyebarkan ideologi dan melakukan perekrutan melalui internet sehingga mereka biasa dikenal dengan sebutan *lone wolf*, hal ini membuat ISIS lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan Al-Qaeda. Sedangkan Al-Qaeda menggunakan sistem jaringan (cell) sehingga lebih mudah dideteksi melalui Jemaah Islamiah. (Tim Viva, 2016)

Al-Qaeda mengikuti Wahhabisme yaitu bentuk ekstrim dari Islam Sunni yang menekankan interpretasi literal dan Quran. Mereka percaya pada konsep jihad defensif, dengan kata lain bahwa mereka percaya jika ada seorang muslim yang melawan mereka maka dapat dipandang sebagai lawan juga, seperti halnya orang kafir. ISIS memiliki taktik militer seperti halnya tentara militer pada umumnya, kekuatan mereka adalah merekrut orang lain melalui media sosial seperti Youtube, Twitter, WhatsApp, Facebook dimana mereka menyebarkan propaganda terorisme yang akhirnya mengundang orang-orang muda untuk bergabung bersama dengan mereka dalam melawan Barat (Tribun Bali, 2018)

V.6 Perkembangan Terkini

Setelah ISIS mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pada 2014 - hingga dikalahkan oleh koalisi militer multinasional pada 2017 - lebih dari 30.000 orang dari 85 negara, termasuk Indonesia, bergabung menjadi anggota kekhalifahan negara Islam (IS) untuk wilayah Suriah dan Irak. Pada saat menjadi simpatisan ISIS diketahui dana yang digunakan pada simpatisan berasal dari swadaya dan mendapatkan dukungan dana dari anggota keluarga, maupun dengan memanfaatkan bantuan uang dari jejaring kelompok teroris domestik dan asing (<https://theconversation.com/amp/yang-tidak-kalah-penting-dari-isu-kepulangan-simpatisan-isis-mengawasi-arus-keuangan-mereka-132972>)

Kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dinyatakan kalah total di wilayah Suriah oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang didukung koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS). Hal ini menandai berakhirnya kekhalifahan kelompok radikal itu atas wilayah-wilayah Irak dan Suriah yang dikuasai selama hampir lima tahun terakhir. Pada masa kejayaannya, ISIS menguasai sejumlah besar wilayah-wilayah strategis Irak dan Suriah. Lebih dari 40 ribu orang dilaporkan pindah dan tinggal di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai kekhalifahan ISIS. Pada saat bersamaan, ISIS melancarkan serangan teroris yang brutal dan mengerikan di berbagai negara. (Christiastuti, <https://m.detik.com/news/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>, 2019)

Pada September 2014, AS membentuk koalisi militer melawan ISIS dan mulai melancarkan serangan udara di Irak untuk menghentikan kelompok radikal itu. Hal ini dilakukan atas permintaan pemerintah Irak setelah kehilangan kendali atas Mosul. Koalisi pimpinan AS, yang mencakup pasukan Australia, Bahrain, Prancis, Yordania, Belanda, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab dan Inggris, mulai melancarkan serangan udara terhadap posisi-posisi ISIS di Irak pada Agustus 2014. Koalisi serangan udara terhadap ISIS di Suriah dimulai sebulan kemudian. Sejak saat itu pesawat-pesawat yang dikerahkan sebagai bagian dari Operation Inherent Resolve telah melakukan lebih dari 13.400 serangan udara di Irak dan lebih dari 16.100 di Suriah.. 'Kekhalifahan ISIS' runtuh hancur lebur: Lalu apa?'. 30 November 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46369141.amp>) Kemudian, pada tahun 2015: Militan yang berafiliasi dengan ISIS di Paris menyerang kantor surat kabar satire dan sebuah supermarket Yahudi. Serangan teror ini mengawali gelombang serangan ISIS di luar negeri. Militan-militan di Libya memenggal warga Kristen dan menyatakan sumpah setia pada ISIS, yang diikuti oleh kelompok-kelompok militan di beberapa negara lainnya.

Pada Mei 2015, ISIS mengambil alih Ramadi di Irak dan kota kuno Palmyra di Suriah. Pada akhir tahun, dua wilayah itu berhasil direbut kembali dari ISIS. Tahun 2016: ISIS mulai kehilangan wilayah-wilayahnya. Pasukan militer Irak, yang dibantu serangan udara koalisi pimpinan AS, berhasil merebut kembali Fallujah dari ISIS pada bulan Juni. Kemudian pada Agustus, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS merebut Manbij dari

ISIS. Bulan Oktober, pasukan Irak dan koalisi pimpinan AS memulai operasi untuk membebaskan Mosul dari ISIS. Pada bulan Desember, pasukan Libya membebaskan Sirte dari ISIS dengan bantuan serangan udara AS. Bulan yang sama, ISIS menguasai kembali Palmyra dari pasukan pemerintah Suriah (Christiastuti, <https://m.detik.com/news/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>, 2019)

Meski kehilangan wilayah-wilayahnya di Irak dan Suriah, ISIS tercatat masih melancarkan lebih dari 1.400 serangan dan membunuh lebih dari 7 ribu orang sepanjang tahun 2016. Data itu dilaporkan oleh University of Maryland tahun 2017. Tahun 2017: Tahun ini menjadi tahun kekalahan besar ISIS. Pada bulan Juni, kota Mosul berhasil direbut kembali dari ISIS setelah terjadi pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Perdana Menteri (PM) Irak saat itu, Haider al-Abadi, menyebut hal itu sebagai 'pengakuan resmi kekalahan' ISIS. Masjid Agung al-Nuri yang menjadi tempat Baghdadi mengumumkan kekhalifahan ISIS tahun 2014, diledakkan oleh ISIS sendiri. Di Suriah, pasukan rezim Suriah yang didukung Rusia dan Iran membebaskan Deir al-Zor dari ISIS dan memperluas kendali pemerintah Suriah hingga ke Sungai Eufrat. Pada bulan Oktober, SDF yang terdiri atas milis Kurdi dan Arab di Suriah, berhasil mengusir ISIS dari Raqqa setelah pertempuran sengit selama empat bulan.

Bulan Desember 2017, PM Abadi menyatakan ISIS telah dikalahkan di Irak. Koalisi pimpinan AS memperkirakan kurang dari 1.000 militan ISIS masih bertahan di wilayah-wilayah Irak dan Suriah. Sebanyak 95 persen wilayah

ISIS telah berhasil direbut kembali. Tahun 2018: Pemerintah Suriah merebut kembali Yarmouk, selatan Damaskus, dari ISIS. Sedangkan SDF terus memburu militan ISIS yang bersembunyi di wilayah dekat Sungai Eufrat. Pasukan militer Irak mengambil alih wilayah-wilayah perbatasan yang tadinya dikuasai ISIS. Bulan Agustus, ISIS merilis rekaman audio berdurasi 55 menit yang disebut berisi suara Baghdadi yang mengakui hilangnya sebagian besar wilayah ISIS dan meminta para militan tetap melanjutkan pertempuran. Dalam pengumuman mengejutkan pada Desember, Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS akan menarik pasukannya dari Suriah. (Christiastuti, <https://m.detik.com/news/internasional/d4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>, 2019).

Kementerian pertahanan Rusia melaporkan pada Agustus 2018, bahwa pasukannya telah melancarkan 39.000 serangan udara di Suriah sejak 2015, menghancurkan 121.000 'sasaran teroris' dan menewaskan lebih dari 5.200 anggota ISIS. Rusia bukan bagian dari koalisi, tetapi jet-jet tempur mereka mulai melancarkan serangan udara terhadap apa yang disebut 'teroris' di Suriah pada September 2015 untuk membantu pemerintahan Presiden Assad.. (BBC News. 'Kekhalifahan ISIS' runtuh hancur lebur: Lalu apa?'. 30 November 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46369141.amp>).

Pada februari 2019: SDF mengumumkan 'pertempuran terakhir' dengan ISIS. Sebuah desa kecil bernama Baghouz di dekat Sungai Eufrat disebut menjadi markas terakhir ISIS di Suriah. Maret 2019: SDF menyatakan Baghouz berhasil dikuasai kembali dan mengumumkan 'kekalahan total' ISIS di Suriah.

Bendera kuning SDF dikibarkan di gedung-gedung Baghouz sebagai buktinya. "Pasukan Demokratik Suriah menyatakan pembersihan total atas hal yang disebut kekhalifahan dan 100 persen kekalahan teritorial ISIS," tegas juru bicara SDF, Mustefa Bali, dalam pernyataannya. (Christiastuti, <https://m.detik.com/news/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>, 2019)

Hasil penelitian pada bulan Oktober 2017 oleh kelompok intelijen strategis yang berbasis di New York, Soufan Center, memperkirakan bahwa sekitar 5.600 petempur ISIS telah kembali ke kampung halaman mereka di 33 negara di seluruh dunia. Yang terbesar, sekitar 900 orang, telah kembali ke Turki. Sementara sekitar 1.200 orang telah kembali ke Uni Eropa - antara lain 425 orang ke Inggris, dan sekitar 300 pulang ke Jerman dan 300 lainnya kembali ke Perancis. Ratusan petempur asing lainnya sudah ditangkap dan masih ditahan oleh SDF di kawasan Suriah timur laut yang dikuasai Kurdi. Amerika Serikat menyerukan negara-negara lainnya untuk membawa pulang warga negara mereka yang bergabung dengan ISIS, untuk diadili. (BBC News. 'Kekhalifahan ISIS' runtuh hancur lebur: Lalu apa?'. 30 November 2018. (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46369141.amp>))

PBB menyatakan puluhan ribu petempur dan anggota keluarga kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) yang ditahan di Irak dan Suriah harus diadili atau dibebaskan. Hal itu dikatakan oleh Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada Juni 2019. Ia juga mendesak sejumlah negara untuk bertanggung

jawab atas warga negara mereka dan mengambil mereka kembali jika terbukti tidak bersalah. Wilayah kekuasaan terakhir ISIS direnggut pada bulan Maret dan sekitar 55.000 orang ditahan. Sekitar 1.000 petempur asing ISIS ditangkap Pasukan Demokratik Suriah yang didukung AS tetapi ratusan orang telah dipindahkan ke Irak untuk diadili. Yang tersisa sebagian besar adalah anggota keluarga mereka (Tempo. PBB: Puluhan ribu tahanan ISIS di Irak dan Suriah harus diadili atau dibebaskan. 25 Juni 2019. <https://www.tempo.co/bbc/4216/pbb-puluhan-ribu-tahanan-isis-di-irak-dan-suriah-harus-diadili-atau-dibebaskan>.

PBB menyatakan terdapat sekitar 29.000 anak-anak petempur asing ISIS di Suriah, 20.000 di antaranya dari Irak, tetapi secara keseluruhan terdapat sekitar 50 kewarganegaraan. Prancis, Rusia, Maroko, Arab Saudi dan Belanda telah mengambil sebagian dari mereka. Australia juga memastikan telah mengungsikan enam anak dari keadaan yang "suram dan rumit" di kamp pengungsi Suriah. Tetapi banyak negara yang menunjukkan ketidakinginan untuk mengizinkan repatriasi. Mereka khawatir pengadilan petempur ISIS kemungkinan sulit dilakukan dan masyarakat sering kali berpandangan sangat menolak pemulangan kembali. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40.000 warga asing dari 80 negara bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah dari bulan April 2013 sampai Juni 2018. Irak telah menawarkan untuk mengadili semua petempur asing yang ditangkap di Suriah. Beberapa warga Prancis adalah bagian dari kelompok yang dihukum mati sejak dipindahkan.

Daftar Pustaka

I. Politik Kontemporer Yaman

Awal Mula Perang Yaman; Mengapa Konflik Terus Memburuk.

<https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/>

Dunbar, C. (1992). *The Unification of Yemen: Process, Politic, dan Prospects.*

www.jstor.org/discover/10.2307/4328466?uid=3738400&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104135552791.htm.

Ferris, J. (2008). "Soviet Support for Egypt's Intervention in Yemen, 1962-1963.

www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/jcws.2008.10.4.5#/doi/abs/10.1162/jcws.2008.10.4.5.htm.

Gerges, F. A. (1995). *The Kennedy administration and the Egyptian-Saudi conflict in Yemen: Co-opting Arab Nationalism.*

<http://www.questia.com/library/journal/1P3-6969321/the-kennedyadministration-and-the-egyptian-saudi#/htm>.

Lenczowski, George. 1992. *Timur Tengah dikancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Lu, X. (2010). "Regional Factors in Yemen's Integration Reunification".

<http://research.shisu.edu.cn/picture/article/13/ad/24/7fc5a2764fe39852c873b566005f/c41bd560-2758-47a1-ba5b-2cd3d94dd67c.pdf.htm>

- M. Fakhry Ghafur. Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair. Peneliti Pusat Penelitian Politik, LIPI. Jurnal Penelitian Politik, Volume 12 No. 2 Desember 2015.
- Menelusuri Sejarah Islam di Yaman, *Republika*,
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/04/30/nmjwf-menelusuri-sejarah-islam-di-negeri-yaman-1>
- Milroie, L. 1983. *Politics and The Soviet Presence in The People's Republic Democratic of Yemen: Internal Vulnerabilities and Regional Challenges*. California: A Rand Note
- Pelletiere, S.C. 1996. *Yemen And Stability In The Persian Gulf: Confronting The Threat From Within*. Carlisle, Pennsylvania: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Ridho Yulian Mulyastanto. *Unifikasi Yaman : Proses Penyatuan Kembali Antara Yaman Utara Dan Yaman Selatan Pada Tahun 1972 – 1990*. Universitas Pendidikan Indonesia, Repository.Upi.Edu.
- Sarah Phillips, *Yemen's Democracy Experiment in Regional Perspective: Patronage and Pluralized Authoritarianism* (New York: Palgrave Macmillan, 2008).
- Tempo. Arab Saudi Lakukan Gencatan Senjata di Yaman Karena Corona. 09 April 2020. <https://dunia.tempo.co/read/1329932/arab-saudi-lakukan-gencatan-senjata-di-yaman-karena-corona/full&view=ok>

Tempo. Houthi Serang Ibu Kota Arab Saudi untuk Pertama Kali Sejak Covid. 24 Juni 2020. <https://dunia.tempo.co/read/1357119/houthi-serang-ibu-kota-arab-saudi-untuk-pertama-kali-sejak-covid>

Tempo. *Kenapa Yaman Dilanda Perang*. 1 November 2018. <https://dunia.tempo.co/read/1142124/kenapa-yaman-dilanda-perang>

II. Politik Kontemporer Kurdi

Ahmad Sahide. Suku Kurdi dan Potensi Konflik Timur Tengah. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 2 NO. 2 / OKTOBER 2013, Program Doktor Kajian Timur Tengah, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

<http://eramuslim.com/berita/dunia/irak-galang-kekuatan-dengan-turkiberangus-kelompok-bersenjata-kurdi.html>

Internationale. 1/3. 2008.

Kiblat.net. Ini Sejarah Kurdi Sejak Era Khalifah Rasyidah sampai Revolusi Suriah. 30 Oktober 2014

Lenczowski, George. 1993. Timur Tengah Di Tengah Kancah Dunia. Terj. Asgar Bixby. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm. 84.

Liputan 6. Mengenal Kurdi, Etnis Terbesar di Dunia yang Tengah Digempur Turki di Suriah. 20 Oktober 2019. <https://www.liputan6.com/global/read/4090125/mengenal-kurdi-etnis-terbesar-di-dunia-yang-tengah-digempur-turki>

Sihbudi, Riza, M.. 1991. Bara Timur Tengah. Bandung: Mizan

Tirto. Kurdi, Bangsa Tanpa Negara. <https://tirto.id/kurdi-bangsa-tanpa-negara-bCPI>

III. Politik Kontemporer Bahrain

Al-Alawi, Irfan. "Saudi Arabia's Anti-protest Fatwa is Transparent," *The Guardian*, 2011,

<https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/apr/01/saudi-arabia-anti-protest-fatwa>.

Amelia Fitriani. Hari Kemerdekaan Bahrain Diwarnai Bentrok. 15 Agustus 2017. <https://rmol.id/amp/2017/08/15/303169/https-dunia-rmol-id-read-2017-08-15-303169>

Aryo Bayu S. Konstruksi Identitas dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi dalam Intervensi Militer di Bahrain Tahun 2011. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Bahrain. <https://kemlu.go.id/manama/lc/read/bahrain/1469/etc-menu>

BBC News. Demonstrasi di Bahrain masuki hari ketiga.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110217_bahrain.amp

Brandon Friedman, "Battle For Bahrain What One Uprising Meant for the Gulf States and Iran," *World Affairs*, Vol. 174, No. 6 (March/April 2012). Hlm. 75.

CNN Indonesia. 15 November 2018. Pemimpin Oposisi Bahrain Terancam Hukuman Seumur Hidup

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181104155837-120-343899/pemimpin-oposisi-bahrain-terancam-hukuman-seumur-hidup>

CNN Indonesia. 27 Juli 2019. Bahrain Eksekusi Mati Dua Aktivis Syiah.

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190727180136-120-416069/bahrain-eksekusi-mati-dua-aktivis-syiah>

Ethan Bronner And Michael Slackman, “Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest,” *New York Times*. March 14, 2011,

<http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15Bahrain.html>

Kompas. Kuwait Jadi Penengah Krisis Bahrain.

<https://internasional.kompas.com/read/2011/03/28/1324244/Kuwait.Jadi.Penengah.Krisis.Bahrain>

Martin Chulov, “Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising,” *The Guardian*, March 14, 2011,

<https://www.theguardian.com/world/2011/mar/14/saudi-arabian-troops-enter-Bahrain>.

Mohamed Fadel, “Saudi Arabia and the UAE send troops to Bahrain to

contribute to security,” Middle East Online, March 14, 2011,
<http://www.middle-east-online.com/?id=106782>.

Republika. 20 April 2013. Diguncang Demo dan Bentrokan, Ini Nasib Ajang F1 Bahrain.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mliwkj>

Republika. Anti-Rezim Bahrain Kembali Berunjuk Rasa.

<https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/07/20/m7fy2g-antirezim-bahrain-kembali-berunjuk-rasa>

Republika. Republika. Iran Menyuarakan Keprihatinan atas Konflik

Bahrain. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/m2yhz8>

Republika. Situasi di Bahrain Makin Buruk.

<https://dunia.tempo.co/amp/389080/situasi-di-bahrain-makin-buruk>

Simon Mabon, “The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry”, *Middle East*

Policy, Vol. 29, No. 2, (Summer 2012).

Virus Revolusi Itu Telah Melanda Bahrain.

https://www.kompasiana.com/bakaruddin_is/550083c7a33311bb7451

13b3/virus-revolusi-itu-telah-melanda-bahrain

IV. Politik Kontempore Qatar

Ahmad, P. 2016. Political Tension in OPEC. PRO PUBLICO BONO –

Magyar Közigazgatás, 2016/2.

BBC News. Krisis Qatar: Empat Faktor Kejengkelan Tetangga Arab.

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036.amp>

BBC News. Krisis Qatar: Iran Kirim Lima Pesawat Bermuatan Makanan.

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40240145.amp>

BBC News. Setahun Diboikot oleh Negara-negara Teluk, Qatar ‘Tidak Juga

Tumbang’. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-44372341.amp>

- Bergman, J. (2018). Qatar is leaving OPEC, and here's why.
<https://www.rivieramm.com/news-content-hub/qatar-is-leaving-opec-and-heres-why-22425>
- Cahyani, S. B (2019). Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran Pasca Kasus Krisis Diplomatik Qatar Tahun 2017. *Journal of International*
news/2018/12/qatar-quits-opec-saudis-walk-tightropeoil-prices
181203222739862.html
- Qothrunnada Quraissyn, Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar Untuk Keluar Dari Keanggotaan OPEC Pada Tahun 2019. Universitas Indonesia
- Sabga, P. (2018). Qatar quits OPEC as Saudis walk tightrope on oil prices.
<https://www.aljazeera.com/>
- Sejarah Negara Qatar. 19 April 2018. <https://www.sejarah-negara.com/808/sejarah-negara-qatar-lengkap/>
- Wang, T. (2019). Natural Gas production – Qatar 1998 – 2018.
<https://www.statista.com/statistics/265336/>

V. Fundamentalisme Dan Terorisme di Timur Tengah

- Al-Jabiri, M. A. (1996). *Addîn wa ad-Daulah wa Tathbîq as-Syarî'ah*.
Markaz Dirâsah al-Wihdah al-'Arabiyah. Hlm. 115
- Al-Qardawi, Y. (1980). *al-Hulûl al-Mustauradah Waqâif Janât 'ala Ummatina*. Beirut: Muassasah a-Risâlah. Hlm. 49.

- Armstrong, Keren (2001) *The Battle of God (Terj. Satrio Wabono dkk)*
Berperang Demi Tuhan. Bandung: Mizan. Hlm. X
- Azra , Azyumardi. "*Exploring historical roots of Muslim crisis" part 2 of 2.*
The Jakarta Post, 6 Mei, 2003
- Bannerman, P (1988) *Islam and Perspective: A Guide to Islamic Society,*
Politics and Law. London Routledges. Hlm. 156
- Binder, L (1961). *Religion and Politics Pakistan*. Berkeley and Los Angeles:
The University of California Press. Hlm. 71
- Borradori, Giovanna *Filsafat dalam Masa Teror*, terj. Alfons Taryadi
(Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2005), hlm. 49.
- Bruce, Steve, *Fundamentalisme: Pertautan Sikap Keberagamaan dan*
Modernitas, terj. Herbhayu A. Noerlambang (Jakarta: Erlangga, 2002),
Hlm. 2-3.
- Christiastuti, Novi *Akhirnya Kalah Total, Begini Awal Sejarah Kemunculan*
dan Jatuhnya ISIS. 25 Maret 2019.
[https://m.detik.com/news/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-
total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis](https://m.detik.com/news/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis)
- Dinamika Keamanan Internasional. *Andalas Journal of International Studies*,
Vol 5 No 1 Mei Tahun 2016. Hlm. 35
- Doyle , Michael,"*Islamic State in Iraq and Syria Losing Ground:*
International Security Experts Discuss," Incident Management Group
(January 12, 2016).

- Gellner, Ernest. *Menolak Posmodernisme: Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*, terj. Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina. Bandung:
- Giddens, A. (1987). *The Nation-State and Violence*. Berkeley: University of California Press. Hlm. 255.
- Haynes, Jeffrey” Transnational Religious Actor and International Order,” *Perspectives Journal* 17, No. 2 (2009), hal.43
- Juergensmeyer , Mark (2002). *Terror in the Mind of God, the Global Rise of Religious Violence*. Berkeley: University of California. Hlm
- Mark Juergensmeyer (1998). *Menentang Negara Sekular: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*. Terj. Noorhaidi Hasan. Bandung: Mihan. Hlm.187-188.
- Kasdi, A. (2002). Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama. *Jurnal Tashwirul Afkar*, (13). Hlm. 19.
- Laksmi, Sylvia Yang tidak kalah penting dari isu kepulauan simpatisan ISIS: mengawasi arus keuangan mereka. 09 Maret 2020.
<https://theconversation.com/amp/yang-tidak-kalah-penting-dari-isu-kepulauan-simpatisan-isis-mengawasi-arus-keuangan-mereka-132972>
- Laquer , Walter (1999). *Fanaticism and the Arms of mass Destruction*. London: Phoenix Press. Hlm. 6

Lawrence , Bruce B. (1998). *Shattering the Myth Islam Beyond Violence*.

USA: Princenton University Press. Hlm. xiii-xvi.

Payani., Ni Luh Bayu Purwa Eka Pengaruh Serangan 9/11 terhadap
Perkembangan

Rahman, F (1979). *Islam and Modernity, An Intelectual Transformation*.

Minneapolis: Bibliotheca Islamica. Hlm. 169

Reuven, Firestone {1999). *Jihad the Origin of Holy War in Islam*. New

York: Oxford University Press. Hlm.13-14.

Rogers, Paul ” *Disarmament Diplomacy” Acronym Reports No. 74*

(December 2003). Hlm. 172

Sahasrad, H., & al-Chaidar. (2017). *Fundamentalisme, Terorisme dan*

Radikalisme; Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara.

Jakarta: Freedom Foundation Hlm. Iv-v.

Schroeder, Ralph {1992). *Max Weber and the Sociology of Culture*.

California: Sage Publication. Hlm. 65-66.

START National consortium for the study of terrorism and respond to

terrorism. ” Terrorists Organization Profile: Al-Qaeda” START

National Consortium. Public Broadcasting Service,” Background: Al-

Qaeda, ” PBS.

Taylor A.R (1988) *The Islamic Question in Middle East Politics*. London:

Westview. Hlm. Vii

Team Viva. Beda Rekrutmen Tentara ISIS dan Al-Qaeda. 19 Sept 2016,

viva.co.id

The Real Terror Network. *Terrorism conducted with the support of a foreign government or organization and/or directed against foreign nationals, institutions, or governments.* Hlm. 22

The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information Center”, ISIS:

Portrait of a Jihadi Terrorist Organization , (Tel Aviv: The Mair Amit Intelligence and Terrorism Information center, 2014), Hlm. 1.

Tibi, B (1988) *The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in The Scientific: Technologi Age.* Salt Lake City: The University of Utah Press. Hlm. 143

Tibi B (2000). *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, (Terj. Imron Rosyidi dkk) Ancaana Fundamentalisme Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. Xv

Tribun Bali. Ini Perbedaan 3 Kelompok Teroris, ISIS, Taliban dan Al-Qaeda. 18 Mei 2018, bali.tribunnews.com

Webster’s (1996). *New Encyclopedic Dictionary.* Koneman, cologne Germany. Hlm. 1071.

<http://www.christianitytoday.com/ct/2001/138>

Vermonte Philips Jusario (2003). "*Kekerasan Sipil Setelah Peristiwa 11 September 2001; Refleksi Atas Perang Melawan Terorisme*".

Pengantar untuk Workshop Civil Right di Indonesia, Kuningan (Jawa Barat), 27-29 Januari, The Japan Foundation AsiaCenter.

